

edisi januari-juni 2016

natas

WAHANA KREATIVITAS MENUJU AKADEMISI KRITIS



APA YANG KITA
ISTIMEWAKAN?

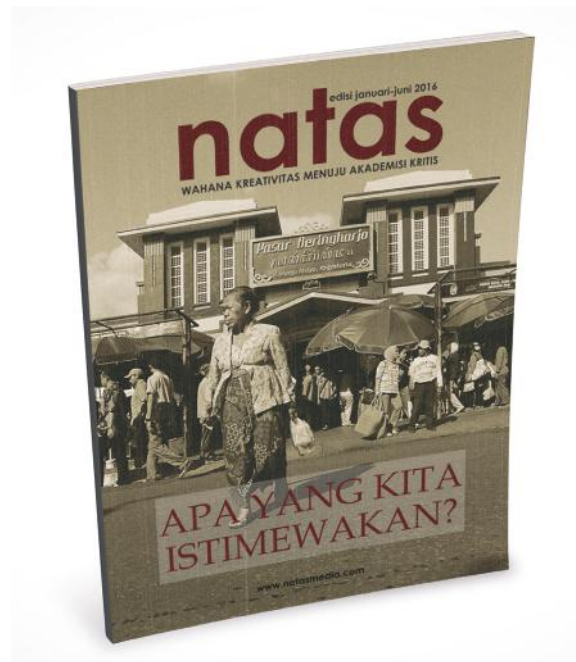


FOTO: J.B. JUDHA JIWANGGA

Unit Kegiatan Pers Mahasiswa **natas**

Pemimpin Umum Gregorius Adhytama | **Sekretaris** Geovany Reinita Deborah,

Paulina Kurniaty Sung | **Bendahara** Tiwi Wira Pratika | **Pemimpin Redaksi Media Cetak** Pandu Wiyoga | **Redaktur Pelaksana Media Cetak** Martinus Danang | **Staf Media Cetak** D. Sandytama, Seftyana Pardosi | **Pemimpin Redaksi Media Online** Atanasius Magnus | **Redaktur Pelaksana Media Online** Fileksius Gulo | **Staf Redaksi Media Online** Ratna Oktaviani | **Pemimpin Redaksi Bahasa** J.B. Judha Jiwangga | **Staf Redaksi Bahasa** Ludgeryus Angger, Konsita Belarosa | **Artistik** Pitrus Puspito | **Kepala Litbang** Istu Septania | **Staf Litbang** Achmad FH Fajar, Fidensius Prasojo | **Kepala Jaringan Kerja** Benediktus Fatubun |
Staf Jaringan Kerja Agenda Yudha

Alamat:

Gedung Student Center Lt. 2 Kampus II Universitas Sanata Dharma, Tromol Pos 29 Yogyakarta 55002.

Surel Redaksi

lpm.natas@gmail.com.

Media Online

www.natasmedia.com

DAFTAR ISI

4	SURAT PEMBACA
6	FOKUS REDAKSI
8	LAPORAN UTAMA
20	LIPUTAN KAMPUS
32	OPINI
37	CATATAN SANG JURNALIS
40	GAUNG SUMBANG
46	RESENSI
52	PERS KITA
56	TOKOH
60	JASMERAH
64	SASTRA
71	SI ICHIR

Beberapa waktu lalu, BEMU dan DPMU mengadakan Forum Lesehan atau Forles. Tujuan utama dari kegiatan ini adalah sebagai wadah supaya aspirasi-aspirasi mahasiswa dapat didengar dan ditindaklanjuti oleh petinggi-petinggi Universitas. Kegiatan ini dihadiri oleh rektorat dan beberapa kepala biro yang ada di universitas. Aspirasi tersebut dikumpulkan oleh DPMU melalui angket yang disebar ke 700 mahasiswa dengan memperhatikan persebaran program studi. Kemudian BEMU menindaklanjuti dengan menciptakan Forum Lesehan ini. Hasil angket tersebut diolah dan kemudian disajikan ketika Forum Lesehan berlangsung. Forum Lesehan ini dibagi menjadi dua sesi. Sesi pertama membahas birokrasi kampus dan pelayanan (BRS *online*, kesesuaian SKS dengan yang didapat mahasiswa, kegunaan uang kesehatan, program *student exchange*, area kampus bebas rokok, dan peminjaman ruang dan alat). Sesi kedua membahas tentang fasilitas yang ada di area kampus (*wi-fi*, kebersihan kamar mandi, layanan parkir, tempat parkir, fasilitas umum, dan kelayakan student centre). Forles ini berjalan lancar dan tidak membosankan karena dihibur oleh Future Band dan musikalisasi puisi dari Beringin Rimbun.

Walaupun berjalan dengan lancar, saya merasa mengganjal. Saya merasa ada yang kurang dari Forum Lesehan kala itu. Jumlah audiensi dari

mahasiswa tidak cukup banyak untuk lingkup universitas dan mengundang petinggi-petinggi rektorat serta beberapa biro. Hanya ada seratusan mahasiswa. Dilihat dari persebaran program studi, Forum Lesehan kala itu merata, hampir semua UKM dan organisasi kemahasiswaan hadir. Tapi mahasiswa di luar organisasi yang tergerak hatinya mengikuti acara penting ini jumlahnya sangat sedikit. BEMU telah menyebarkan informasi melalui poster cetak maupun digital. Selain itu BEMU telah membuat surat yang ditujukan ke semua organisasi di universitas supaya masing-masing mengirimkan beberapa peserta. Di samping itu kami melakukan *broadcast* ke UKM-UKM dan organisasi kemahasiswaan tingkat fakultas dan program studi melalui grup media sosial. Bahkan beberapa kali kami *broadcast* ulang. Upaya yang telah kami lakukan ini saya kira belum efektif untuk menarik massa mahasiswa Sanata Dharma.

Dalam benak, saya bertanya-tanya dengan situasi kampus seperti ini. Saya melihat kegiatan seperti ini belum seksi bagi mahasiswa sehingga urung untuk terlibat walaupun penting. Beda halnya apabila kegiatannya berupa konser band atau acara yang gemerlapan, pastilah akan banyak yang hadir. Saya pun berefleksi dengan keadaan seperti ini. Ini menjadi PR besar bagi saya untuk menggerakkan mahasiswa untuk terlibat aktif dalam forum semacam ini. Saya pribadi mengakui bahwa kegiatan Forum Lesehan merupakan wadah yang penting

dan seyogianya dihadiri banyak mahasiswa bahkan mungkin perlu ratusan bahkan ribuan karena ini menyangkut aspirai warga Sanata Dharma. Inilah wadah mahasiswa untuk menyalurkan aspirasi langsung ke rektorat dalam rangka menjadikan mahasiswa sejahtera dan Sanata Dharma semakin berkembang dan berbenah sehingga proses mencetak generasi-generasi penerus bangsa dapat optimal. Kami, BEMU akan tetap menyampaikan informasi ke teman-teman mahasiswa dengan cara-cara baru yang mungkin akan menarik minat mahasiswa untuk terlibat. Walaupun demikian, perlu kesadaran juga dari mahasiswa untuk mau terlibat. Berkah Dalem.

Angga Dwi Putra

Presiden Badan Eksekutif Mahasiswa USD periode 2016

Berbicara mengenai dana dalam sebuah kepanitiaan, pasti ada tanggapan bahwa dana tersebut ada kemungkinan untuk disalahgunakan untuk yang tidak semestinya. Karena dalam kepanitiaan, mereka yang terlibat di dalam panitia pasti ada beberapa panitia yang beranggapan bahwa mereka bekerja dan mencurahkan segala keringat dan ide-idenya untuk berlangsungnya acara tersebut menjadi sukses, tetapi mereka tidak dibayar.

Mereka sudah mengeluarkan tenaga, waktu, hati dan pikiran supaya acara tersebut berjalan lancar dan sukses tanpa kurang suatu apapun. Mereka tidak dibayar dalam suatu kepanitiaan memang benar adanya, tetapi ada cara lain menghargai jerih payah mereka dalam suatu kepanitiaan. Dengan cara memfasilitasi mereka ketika masih dalam proses dinamika, supaya mereka bekerja dengan hati. Seperti dengan memfasilitasi mereka dengan cara disediakan anggaran untuk makan, *snack*, dan kalau perlu dibuat acara keakraban panitia ataupun disediakan anggaran untuk pembelian baju panitia.

Adapun cara lain untuk mengurangi tindak penyalahgunaan dana adalah dengan cara membuat daftar harga barang atau jasa yang berada di pasaran, supaya dari daftar harga tersebut menjadi suatu patokan atau referensi dalam pembelian atau jasa yang nantinya digunakan dalam pembuatan proposal

panitia. Seperti tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia, Nomor 33/PMK.02/2016 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2017 yang bisa diunduh dalam www.jdih.kemenkeu.go.id, di situ tertuang harga standar atau harga sewajarnya untuk setiap harga rata-rata dan maksimal untuk pembelian atau penyewaan barang dan jasa setiap daerah di Indonesia. Dan itu bisa menjadi referensi setiap harga yang akan diajukan oleh panitia dalam proposal.

Lalu berbicara mengenai *fee*, legal atau ilegal kah sebuah *fee*? Apakah menerima sebuah *fee* dari sebuah penyedia jasa yang sudah panitia sewa dianggap legal? Itu salah satu dari beberapa pertanyaan yang belum terjawab oleh setiap mahasiswa yang aktif dalam kepanitiaan selama ini. *Fee* merupakan istilah lain dari komisi atau imbalan yang diterima atas usaha yang telah dikerjakan untuk pihak lain.

“Bisa dianggap legal, karena dana yang sudah dibayarkan kepada pihak penyedia jasa sudah menjadi hak kepemilikan sepenuhnya pihak jasa tersebut,” ucap salah satu mahasiswa yang berkecimpung di kepanitiaan. Dalam artian, jika dana tersebut akan digunakan beberapa persen untuk pembayaran *fee* sebagai ucapan terima kasih oleh penyedia jasa, maka itu sudah menjadi hak penyedia jasa apakah akan memberikan *fee* atau tidak, tuturnya.

Setelah beberapa kali menggali info tentang hal tersebut, dapat saya simpulkan bahwa, hal seperti ini bukan penyelewengan

dana atau pemakaian dana yang disalahgunakan. Kesepakatan harga dari awal antara penyewa jasa dan penyedia jasa sudah tersepakati dan tidak ada perubahan di akhir acara, dan itu dianggap legal. Karena untuk harga yang tertulis di nota adalah sesuai dengan kesepakatan bersama. Dan *fee* adalah sebagai tanda ucapan terima kasih. Namun, kita sebagai mahasiswa yang terjun langsung di dalam hal seperti itu, haruslah pandai dalam menyikapi hal tersebut. *Fee* tersebut haruslah transparan dan bertanggung jawab sehingga semua panitia turut tahu akan hal itu.

Samuel Henry

Ketua Dewan Perwakilan Mahasiswa
USD Periode 2016

APA YANG KITA ISTIMEWAKAN?



*Rungakna iki gatra saka Ngayogyakarta
Negeri paling penak rasane kaya Swarga
Ora peduli donya dadi neraka
Ning kene tansah edi peni lan mardika*

(Jogja Istimewa, Jogja Hip Hop Foundation)

Rupanya kita tidak perlu tahu substansi dan sejarah keistimewaan Yogyakarta untuk merasakannya. Cukup mendengarkan sepenggal lirik lagu *Jogja Istimewa* dari **Jogja Hip Hop Foundation**, kita jadi tahu kalau Yogyakarta itu tempat yang nyaman seperti surga. Tidak peduli dunia jadi neraka, kota ini tetap nyaman dan aman.

Kini lima tahun berlalu sejak lagu itu diciptakan. Ada banyak perubahan dalam diri kota bercita rasa surga ini. Slogan “Jogja Istimewa” dan “Jogja Berhati Nyaman” kalah populer dibanding slogan “Jogja Asat”, “Jogja Ora Didol” dan “Jogja Berhenti Nyaman”.

Yogyakarta memang tak lagi nyaman. Jika dulu ia terkenal sebagai kota budaya dan kota pelajar, kini ia lebih ingin dikenal sebagai kota modern. Begitu banyak hotel dan mal yang tinggi menjulang di tempat yang kadang tidak pas. Akibatnya air tanah menjadi terkuras dan di beberapa tempat masyarakat harus merasakan kekeringan yang ganas.

Hal lain seperti kemacetan kini juga lekat dalam kehidupan masyarakat Yogyakarta. Hal ini semakin diperparah dengan fasilitas angkutan umum yang kurang memadai. Trans Jogja yang digadang menjadi solusi kemacetan masih memiliki kekurangan, seperti AC dalam beberapa bus tidak menyala, pintu bus yang sulit dibuka bahkan macet, cara sopir mengendarai bus yang terhitung ugal-ugalan, kemoloran waktu

bus sampai di halte, serta banyak mesin yang sudah mulai tidak layak pakai yang ditandai dengan munculnya asap hitam dari knalpot.

Parahnya lagi, menurut survei yang dibuat Kementrian Agama, Yogyakarta yang sebelumnya akrab dijuluki sebagai *city of tolerance* pada tahun 2015 menduduki peringkat kelima sebagai kota dengan indeks kerukunan umat beragama terendah (Tempo, 4-10 Juli 2016). Fakta ini bertolak belakang dengan gambaran umum masyarakat Yogyakarta yang ramah dan terbuka, atau mungkin inilah yang disebut *wong jawa ilang jawane lan lali marang budi pakertine?*

Peristiwa pengepungan Asrama Mahasiswa Papua oleh kepolisian dan sejumlah ormas pada Jumat (15/7) menjadi contoh lain bagaimana Yogyakarta telah kehilangan martabatnya sebagai kota yang toleran terhadap para pendatang. Padahal faktanya, Mahasiswa Papua yang sering mendapat sentimen negatif sebagai biang keladi kerusuhan di Yogyakarta justru yang paling sering menjadi korban tindak kekerasan.

Bahkan, sejak tahun 2008, ada tiga Mahasiswa Papua yang tewas dibunuh orang tidak dikenal. Sampai sekarang, kasusnya belum juga terungkap.

Nasib malang Mahasiswa Papua berlanjut sampai pada diskriminasi hukum. Analisis ini didasarkan pada fakta lapangan yang menunjukkan kepolisian selalu berhasil merampungkan seluruh kasus kekerasan yang melibatkan mahasiwa

Papua sebagai pelaku. Hal ini berbanding terbalik dengan kasus kekerasan yang menempatkan Mahasiswa Papua sebagai korban.

Di lain sisi, gerakan-gerakan akar rumput mulai muncul dan mencoba mengembalikan martabat Yogyakarta sebagai kota berhati nyaman. Di Kampung Jogoyudan misalnya, proyek pemunduran pemukiman sekitar bantaran Kali Code mulai menuai hasil positif. Kawasan yang dulu sempit dan kumuh, kini terlihat lebih tertata dan enak di pandang.

Saat ini keistimewaan Yogyakarta memang belum berubah. Namun, apakah hanya sebatas itu keistimewaan Yogyakarta dapat dimaknai? Di tengah berbagai peristiwa yang mencoreng martabat Yogyakarta sebagai kota budaya sudah saatnya bagi masyarakat Yogyakarta untuk merenungkan kembali arti keistimewaan Yogyakarta. Semoga saja benar apa yang dinyanyikan oleh **Jogja Hip Hop Foundation** bahwa yang istimewa dari Yogyakarta bukan hanya negerinya tapi juga sekaligus orangnya.

*Hamemayu, hayuning bawana
ditata, dititi, ditentrem kerta
raharja.*

*Seiring dengan semangat zamannya,
apakah Jogja siap istimewa?*

*(Jogja Ora Didol, Jogja Hip Hop
Foundation)*



Asrama Mahasiswa Papua Kamasan dijaga ketat polisi Jumat (15/7).

FOTO: EGI

JEJAK DARAH MAHASISWA PAPUA

PANDU WIYOGA

Sejumlah kekerasan bahkan pembunuhan mahasiswa Papua membentangkan jejak darah yang lenyap di proses penyidikan kepolisian.

Di penghujung tahun 2014, dua reporter **natas** saya dan Jeje, mencoba bertemu sumber anonim, sebut saja Bram, terkait kasus pembunuhan seorang Mahasiswa APMD asal Papua bernama Paulus Petege. Rumah kontrakan berwarna putih pucat di daerah Condong Catur menjadi tujuan kami. Rumah itu gelap gulita dan sepi, tak nampak seorang pun ada di dalamnya. Hujan deras masih mengguyur saat kami berdua menunggu kedatangan Bram selama hampir dua jam. Di dalam rumah itu kami ditemani satu orang teman yang memilih untuk tidak disebutkan namanya, dialah yang menjadi penghubung kami dengan Bram.

Keheningan pecah saat deru beberapa sepeda motor berhenti di depan rumah itu. Empat orang berbadan besar masuk menemui kami, salah satunya memperkenalkan diri sebagai Bram. Kami bertujuh duduk membentuk lingkaran di ruang tengah yang tidak diterangi cahaya lampu. Hanya ada sedikit cahaya dari dapur yang samar-samar menerangi Bram dan tiga kawan lainnya. Sempat selama beberapa menit Bram dengan nada agak gusar berbincang dengan si penghubung dengan bahasa Papua yang tidak kami mengerti.

Sebentar kemudian ia beralih memandang kami berdua, “Nanti kalau ada orang tanya, saudara ini bukan orang Papua lalu saudara dapat info tentang perkara orang Papua dari mana, saudara mau jawab apa?” Sempat beberapa kali

menolak untuk memberikan info lebih jauh terkait kasus pembunuhan Paul, akhirnya Bram mau berbagi sedikit informasi dengan berbagai syarat yang kami sepakati bersama termasuk kewajiban kami untuk merahasiakan identitasnya.

“Kami ini orang Papua datang ke Yogyakarta *mo* belajar, tapi kenapa banyak orang meneror kami,” ujarnya dengan suara bergetar. Tampak betul kekhawatiran Bram atas keselamatan dirinya, beberapa kali ia menengok ke arah jendela saat ada suara sepeda motor berhenti di depan rumah. “Saudara ini bukan orang Papua, mungkin saudara *tara* tahu kalau di Papua hampir setiap hari ada orang mati ditembak oleh aparat, hukum di Indonesia ini *tara* berlaku untuk kami,” ungkap Bram sambil terus mengawasi jendela di belakangnya. Pukul 19.30 WIB, kami mengakhiri wawancara dengan Bram. “Kalau saudara *su* mantap *mo* tulis ya *tara* apa, tapi saudara tanggung sendiri risikonya,” ujar Bram sambil berjabat tangan melepas kepergian kami.

Liputan tentang kasus Paul sempat terhenti cukup lama. Saat itu tidak ada orang yang bisa menghubungkan kami dengan narasumber lain. Beberapa kali kami sempat menghubungi orang-orang yang menurut Bram mau berbicara soal kasus Paul, tapi hasilnya nihil. Semua kontak menolak untuk diwawancarai. Sampai akhirnya pada Mei 2016, secara tidak disangka seorang kawan dekat Paul yang bernama Hery Tebay menyatakan bersedia diwawancara. Malam itu jam

menunjukkan pukul 22.00 WIB saat Hery mengirim pesan pendek, “kalau mendesak, malam ini juga saya bisa diwawancarai.”

Tanpa buang waktu, saya beserta Egi, Pemimpin Umum **natas**, dan Istu, seorang reporter **natas**, sepakat untuk bertemu Hery di sebuah kafe daerah Nologaten. Saat kami datang suasana kafe sangat ramai dan kami harus menunggu beberapa menit sebelum seorang lelaki dengan rambut gimbal dan dandanan *a la* Bob Marley mendatangi kami. Hery berbeda dengan narasumber sebelumnya, ia tampak lebih santai bercerita tentang Paul. “Kalau ada orang *mo* bunuh saya ya tidak masalah, kalau memang mati ya sudah,” ujarnya sambil tertawa lebar.

Hery mengakui keterkejutannya saat pertama kali mendengar kabar bahwa Paul dibunuh dua orang tidak dikenal di Titik Nol Kilometer, Yogyakarta. “Paul itu kawan dekat saya, sebenarnya dia tinggal di asrama Dogiyai tapi hampir tiap malam dia menginap di kamar kost saya. Jadi saya tahu betul kepribadiannya.” Sebagai anak dari Paniai yang baru datang ke Yogyakarta dan menjalani kuliah semester pertama, ia yakin betul Paul tidak memiliki musuh. Satu-satunya masalah yang Hery ingat adalah Paul pernah mendapat teguran keras dari pemerintah Kabupaten Dogiyai terkait tulisannya yang mengkritik kebijakan kabupaten itu.

Dari Hery pula, kami mengetahui kronologi pembunuhan Paul. Ia bercerita waktu itu tanggal 5 Mei 2014

saat Paul dan seorang temannya sedang mengobrol di Titik Nol Kilometer sambil memesan kopi dari salah satu kios angkringan yang ada di situ. Tak lama kemudian, ada dua sepeda motor berhenti tepat di belakang Paul, dua orang mengenakan pakaian serba hitam turun dari motor dan salah satunya memukul kepala bagian belakang Paul dengan besi yang dililit karet. Sempat dilarikan ke RS PKU Muhammadiyah pada jam 21.00 WIB, nyawa Paul tidak bisa ditolong karena pendarahan hebat di dalam kepalanya. Ia dinyatakan meninggal pukul 05.00 WIB.

Disinggung mengenai dugaan siapa pelakunya Hery hanya mengerinyitkan dahi, “yang jelas pelakunya itu profesional, dia tahu cara bunuh orang dengan cepat dan tidak meninggalkan jejak”. Menurut Hery, alat yang dipakai untuk membunuh Paul, tongkat besi yang dililit karet, menunjukkan bahwa pelaku tahu benar cara untuk membunuh yang tidak meninggalkan jejak. Alat itu tidak akan menyebabkan luka luar pada korban tapi tetap akan meremukkan tulang dan mengakibatkan luka dalam parah yang menyebabkan kematian.

Di tempat berbeda, seorang Mahasiswa Papua bernama Roy Karoba yang diwawancarai oleh reporter **natas** lainnya Sefty, mengungkapkan keheranannya jika sampai saat ini polisi tidak berhasil mengungkap pelaku pembunuhan Paul. “Kasus Paul itu kan jelas, kejadiannya di pusat kota, ada banyak saksi mata dan jelas ada banyak CCTV di situ,” ungkapnya sambil

menggelengkan kepala tidak percaya. Roy menambahkan bahwa bukan hanya proses hukum kasus Paul yang macet, tapi hampir semua kasus kekerasan yang melibatkan Mahasiswa Papua sebagai korban selalu berakhir tanpa ada penyelesaian hukum yang jelas.

Saat wawancara bersama Sefty, Roy sempat menyebut nama Emanuel Gobay (Edo) sebagai orang yang berwenang mengadvokasi mahasiswa Papua jika terbelit kasus hukum. Tanggal pertama bulan Juni, saya beserta Jeje dan Egi menemui Edo di kantor LBH daerah Kotagede. Papan nama kantor LBH itu tertutup pepohonan

pada kategori delik pidana biasa tidak pernah ditangani pihak kepolisian secara profesional,” ujarnya yakin. Ia mengatakan bahwa semua kasus itu berhenti di proses penyidikan yang artinya tidak ada satu kasus pun yang menghasilkan putusan apa pun.

Lebih jauh, Edo mengungkapkan adanya diskriminasi hukum terhadap Mahasiswa Papua yang dilakukan oleh pihak kepolisian. Pendapatnya didasarkan pada fakta di lapangan bahwa kepolisian selalu berhasil merampungkan seluruh kasus kekerasan yang melibatkan mahasiswa Papua sebagai pelaku. Hal ini berbanding terbalik

“Sering kali aparat menganggap kehadiran dan aktivitas mahasiswa Papua di Yogya ini merupakan ancaman tersendiri.”

- Edo

rindang, di depan rumah bercat hijau pucat itu ada lima sepeda motor terparkir rapi. Empat kursi hitam di ruang tamu menyambut kami saat kami masuk ke dalam kantor. Di ruang tengah terlihat beberapa orang sedang duduk melingkar untuk merapikan sesuatu.

Sempat beberapa saat menunggu akhirnya seorang bertubuh gempal memperkenalkan diri sebagai Emanuel Gobay (Edo) dan mempersilahkan kami masuk ke ruangannya. “Sejak tahun 2005 saat saya masih kuliah, secara umum kasus kekerasan terhadap Mahasiswa Papua yang termasuk

dengan kasus kekerasan yang menempatkan Mahasiswa Papua sebagai korban. “Perlakuan berbeda di hadapan hukum ini muncul setelah tahun 2006,” tambah Edo.

Dari data yang dibagikan Edo kepada kami, semenjak tahun 2008 hingga tahun 2016 ada tujuh kasus kekerasan terhadap Mahasiswa Papua yang tidak diusut tuntas. Tiga di antaranya berujung kematian korban. Korban meninggal selain Paulus Petege adalah Elisabet Isir, seorang alumna APMD (Akademi Pemerintahan Masyarakat Desa) yang diperkosa dan dibunuh sebelum mayatnya

dibuang di pinggir rel kereta api daerah Timoho pada tahun 2009. Setahun sebelumnya juga ada penemuan mayat mahasiswa Papua di seputaran *Ring Road* Barat. Setelah otopsi ditemukan adanya tindak kekerasan yang mengakibatkan kematian korban.

Menurut Edo sebelum tahun 2006 perlakuan kepolisian terhadap Mahasiswa Papua masih tergolong biasa. Contohnya ketika ada perkelahian atau kekerasan yang melibatkan Mahasiswa Papua sebagai pelaku maka kepolisian akan menyerahkan mahasiswa tersebut kepada komunitas Papua terdekat. Pasca tahun 2007 kepolisian tidak lagi memberi ruang untuk penyelesaian secara kekeluargaan bagi Mahasiswa Papua yang terbelit kasus hukum. “Sebenarnya apa yang dialami Mahasiswa Papua saat ini sama persis dengan apa yang dialami mahasiswa asal Aceh saat Aceh masih menjadi Daerah Operasi Militer,” tambah Edo sambil menghidupkan sebatang rokok.

“Sering kali aparat menganggap kehadiran dan aktivitas Mahasiswa Papua di Yogyakarta ini merupakan ancaman tersendiri,” ujarnya. Edo menganggap bahwa aparat keliru menganggap tuntutan Mahasiswa Papua atas hak menentukan nasib sendiri sebagai tuntutan atas kemerdekaan Papua. Anggapan yang lahir dari persoalan politik Papua tersebut akhirnya berujung pada stigma politik terhadap Mahasiswa Papua yang mengandaikan bahwa semua Mahasiswa Papua di Yogyakarta adalah kelompok separatis



Edo saat diwawancara reporter **natas** di kantornya (30/5).
FOTO: JEJE

yang pantas diwaspadai sebagai sebuah ancaman.

Pada bulan Desember 2015 sentimen terhadap Mahasiswa Papua semakin diperparah oleh deklarasi Front Jogja Anti Separatis yang digawangi oleh ketua Paksi Katon, Muhammad Suhud dan anggota DPRD DIY dari fraksi PDIP, Chang Wendriyanto. Dalam deklarasi itu ada anjuran kepada segenap masyarakat Yogyakarta untuk menutup asrama Mahasiswa Papua di Yogyakarta dan mengusir seluruh Mahasiswa Papua dari Yogyakarta. “Dua tokoh masyarakat itu kami laporkan ke Polda terkait deklarasi rasis tersebut, tapi sampai saat laporan tersebut belum ditindaklanjuti oleh kepolisian,” ujar Edo menambahkan.

Kasus terakhir dalam ingatan Edo adalah pengepungan asrama Papua daerah Kusumanegara oleh polisi bersenjata lengkap saat acara peringatan hari kematian Arnold Ap pada tanggal 29 dan 30 Mei 2016. Arnold Ap adalah seorang antropolog,

musisi dan kurator Museum Universitas Cendrawasih yang diyakini dibunuh oleh Kopassus pada tahun 1984. Edo mengungkapkan kegelisahannya melihat banyaknya kasus kekerasan dan diskriminasi Mahasiswa Papua di Yogyakarta, “sejujurnya saya khawatir jika isu diskriminasi ini dipakai sebagai alat untuk menguatkan kelompok tertentu.”

PROYEK BANTARAN CODE, USAHA MITIGASI

DIONISIUS SANDYTAMA



Di Kampung Jogoyudan, Kelurahan Gowongan, Kecamatan Jetis, Kota Yogyakarta sedang dilaksanakan proyek pemunduran kawasan permukiman khususnya yang berada di tepi sungai sejauh tiga meter dari tepian sungai. Proyek ini juga sekaligus sebagai penataan kawasan tersebut. “Dahulu kawasan sini sangat sempit dan kumuh, tetapi sekarang bisa kita lihat sendiri, jauh lebih tertata dan enak dipandang,” tutur Danu

Mariyanto, warga setempat yang juga turut bekerja dalam proyek ini.

Proyek ini digagas Atok Setyobudi, Kepala Badan Keswasembadaan Masyarakat (BKM) Kelurahan Gowongan. Ia kemudian mengemukakan idenya kepada warga di kampung tersebut. “Kalau untuk penataan, bisa dikatakan seluruh warga setuju. Tetapi, masalah ganti rugi yang cukup membuat pusing,” tuturnya. Atas dasar itulah, dibuat pembagian tugas dengan dibentuknya KSM (Keswasembadaan Sosial Masyarakat). “Jadi BKM

membentuk KSM. Akhirnya disepakati BKM diberi kepercayaan mengurus masalah pendanaan dan hubungan dengan warga, sedangkan KSM mengurus masalah teknis pekerjaan, semisal mencari tenaga kerja, menyewa tim ahli, dan lain sebagainya. Dengan begitu masalah-masalah yang ada bisa cepat teratasi karena masing-masing menangani hal-hal yang sudah ditentukan,” imbuhnya.

Akhirnya setelah mempertimbangkan berbagai opsi yang ada dan beberapa kali bertemu warga, terjadilah



Proyek Bantaran Code di Kampung Jogoyudan, Kelurahan Gowongan Senin (11/7).

FOTO: JEJE

kesepakatan. “Warga tidak mendapat ganti rugi. Sebagai gantinya, rumah mereka yang kita “keprasa”, kita bangun sesuai dengan keinginan pemilik rumah. Mereka minta desainnya begini, kita mengikuti. Jadi, kita tanggung jawab,” jelasnya. Kesempatan ini juga dapat ia gunakan untuk melaksanakan konsep M3K (Mundur, Munggah, Madhep Kali) yang berarti permukiman di bantaran sungai harus menghadap ke sungai tetapi harus sedikit menjauhi tepian sungai dan naik dari batas permukaan air jika terjadi banjir.

Proses eksekusi proyek ini sempat menemui hambatan tatkala ia harus melakukan nego dengan pihak pemerintah perihal jarak permukiman penduduk dengan batas tepi sungai. “Saya juga sempat bertemu dengan Gubernur DIY, Sri Sultan Hamengkubuwono X karena beliau juga termasuk yang mengusulkan adanya pemunduran permukiman ini. Bersama dengan Dinas Pekerjaan Umum (PU) provinsi maupun kota dan Dinas Permukiman, Prasarana, dan Wilayah (Kimpraswil). Mereka mintanya sepuluh meter karena

di dalam peraturan memang tertulis begitu. Kalau sepuluh meter tetapi di daerah pedesaan mungkin masih bisa. Tetapi, ini di kota dengan kepadatan penduduk seperti ini. Jika memang sepuluh meter, akan berapa ratus bahkan ribu rumah yang tergusur?” tuturnya. Setelah berkali-kali nego, disepakatilah jarak tiga meter.

Yulianto, pengawas proyek, menuturkan, pemunduran permukiman ini memiliki beberapa tujuan dimana masyarakat bisa merasakan manfaatnya. “Dahulu sepeda motor tidak bisa berpapasan. Tetapi bisa kita lihat sendiri, mobil pun sekarang bisa masuk,” tuturnya. Lebih lanjut, jelasnya, tujuan yang lebih penting adalah soal mitigasi bencana, terkhusus ambulans dan pemadam kebakaran supaya bisa menjangkau hingga ke permukiman warga. “Dahulu kalau ada warga yang harus dilarikan ke rumah sakit, harus ditandu sampai jalan besar karena ambulans tidak bisa masuk,” tambah pria yang juga warga Kampung Jogoyudan ini.

Proyek ini sendiri baru dikerjakan dari bawah Jembatan Kewek sejauh 200 meter ke utara atau yang masuk wilayah Kampung Jogoyudan. Tetapi tak menutup kemungkinan akan dilanjutkan ke utara lagi hingga bawah Jembatan Gondolayu. “Kemungkinan besar juga bisa, bahkan warga di kampung sebelah sudah banyak yang menanyakan. Mungkin karena mereka melihat hasil di kampung sini yang memberi banyak manfaat,” imbuh Yulianto.

Meskipun begitu masih banyak kawasan di bantaran Kali Code yang belum terjamah proyek ini. Salah satunya kawasan Kampung Code atau yang lebih dikenal dengan Kampung Rama Mangun. Faktanya jarak permukiman di kampung tersebut dengan batas permukaan air jika terjadi banjir hanya satu meter. Padahal, hal tersebut telah dijamin di dalam Pasal 9 Ayat (2) Peraturan Presiden (PP) No.38 Tahun 2011 disebutkan bahwa jarak garis sempadan sungai minimal 10 meter dari tepi kiri dan kanan palung sungai sepanjang aliran sungai.

Asih, salah satu warga RT 1/RW 1, Kampung Code, Yogyakarta, mengakui jarak sempadan di kampungnya terlalu sempit. Ia mengaku selama ini tidak ada perhatian dari pemerintah perihal tersebut. Namun begitu, ia dan beberapa warga lainnya tak ingin ada proyek pemunduran permukiman di kampung tersebut. “Sebenarnya tidak nyaman juga kalau begini, orang berjalan kaki saja tidak bisa berpapasan. Tetapi, jika ada proyek pemunduran itu, ruang sempit seperti ini akan dibongkar. Itu justru malah merepotkan, lalu bagaimana nanti kami tinggal selama itu dikerjakan?” kilahnya.

Sekretaris RT 1/RW 1 Kampung Code, Yogyakarta, Jeni Hermawan, berpendapat untuk saat ini kampungnya belum memerlukan proyek pemunduran kawasan permukiman. “Saya memang mengetahui ada proyek penataan itu di kampung lain. Untuk Kampung Code sementara

ini belum mendapat sosialisasi apapun tentang itu dari pihak berwenang. Tetapi saya rasa di sini belum perlu dilakukan pemunduran permukiman karena di sini sebagian besar konsep rumahnya adalah rumah panggung yang bertingkat, kalau

“Sebetulnya sesuai peraturan harus 15 meter, tetapi kami juga memperhatikan hak hidup orang banyak”

dibongkar untuk dimundurkan tentu akan sangat repot pembongkarannya,” ujar pria yang sehari-hari berprofesi sebagai penjaga parkir ini.

Menurutnya, konsep rumah panggung sudah cukup untuk mencegah bahaya yang sering mengancam, seperti banjir. “Dengan konsep rumah panggung ini, kalau terjadi banjir, warga tidak perlu khawatir terendam karena tempat tinggalnya lebih tinggi,” jelasnya. Selain itu, bagian bawah rumah panggung juga bisa dijadikan tempat bermain bagi anak-anak. “Jadi, kalau tujuan pemunduran permukiman itu supaya tercipta ruang yang lebih lega, saya pikir di kampung ini juga sudah mempunyai ruang, terutama untuk anak-anak bermain,” imbuhnya.

Yunita Rahmi Hapsari, Kepala Seksi Permukiman Dinas Kimpraswil Kota Yogyakarta menyebut tujuan dimundurkannya kawasan permukiman di bantaran Kali Code lebih kepada pembuatan jalan inspeksi, mitigasi bencana,

dan penataan tata ruang. “Jadi salah kalau orang menyebut pemunduran permukiman ini bertujuan untuk pencegahan banjir. Kalau pencegahan banjir bisa dengan peninggian tanggul atau pembersihan sampah-sampah di sungai,” jelasnya.

Selain berpacu pada PP No.38 tahun 2011, dalam menangani proyek pemunduran permukiman di bantaran Kali Code, Kimpraswil juga berpacu pada RDTRK (Rencana Detail Tata Ruang dan Kawasan) yang termasuk dalam Peraturan Daerah (Perda) Kota Yogyakarta. Di dalam RDTRK disebutkan bahwa batas sempadan sungai yang harus bebas dari bangunan sebesar 10-15 meter. “Tetapi kami juga menyadari tidak semua daerah pinggir aliran sungai di Kota Yogyakarta dapat menerapkan kebijakan tersebut. Salah satunya di Kampung Jogoyudan tersebut karena disana juga termasuk kawasan padat penduduk. Akan ada beberapa rumah yang tergusur jika kami memaksakan kebijakan tersebut,” ujar Yunita. Untuk menyelesaikannya, pihaknya lebih mengutamakan negosiasi dengan warga. “Kalau memang hanya bisa tiga meter ya tidak apa-apa. Proyek seperti ini warga yang mengusulkan, kami hanya membantu dalam hal penataannya berdasarkan

peraturan yang berlaku. Tapi kalau ternyata peraturan tersebut tidak sesuai dengan yang terjadi di lapangan, musyawarah dan negosiasi menjadi jalan tengah yang terbaik,” tuturnya.

Saat ini pihaknya juga sedang mengagendakan penataan kawasan permukiman di bantaran Kali Code. Tak kurang dana 1 milyar rupiah akan digelontorkan untuk pengerjaan proyek ini. Dana tersebut akan dibagi menjadi dua bagian, yaitu 150 juta rupiah untuk dan 850 juta rupiah untuk pengerjaan fisik. “Saat ini proyek pemunduran kawasan permukiman yang sedang dilakukan di Kampung Jogoyudan kami wacanakan akan dilanjutkan ke utara hingga ke Jembatan Gondolayu. Sedangkan daerah bantaran Kali Code yang meliputi wilayah Tunggak dan daerah jembatan Rumah Sakit Sardjito baru dalam tahap perencanaan,” jelasnya.

Senada dengan Yunita, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Provinsi DIY, Haungrah Purwadi menuturkan tujuan utama pemunduran kawasan permukiman penduduk di wilayah bantaran Kali Code adalah untuk mitigasi bencana dan penataan tata ruang. “Kita tahu sendiri Kali Code menjadi ikon Kota Yogyakarta. Banyak orang luar berbicara tentang Code, di situ nampak potensi pariwisata yang dapat dikembangkan. Maka dari itu, tugas kami juga melakukan penataan di kawasan sungai tersebut sesuai dengan tugas dan wewenang yang kami miliki,”

jelas Hanung, sapaan akrabnya.

Ketika ditanya mengenai pembagian tugas dan wewenang institusinya dengan Kimpraswil di dalam penataan wilayah permukiman di bantaran sungai, ia menyebut institusinya lebih bergerak ke arah pelaksanaan teknis penataan, seperti membuat perjanjian dengan warga, pihak pekerja, dan menentukan waktu pelaksanaan proyek. Sedangkan Kimpraswil lebih memikirkan konsep penataannya agar memberi dampak yang bermanfaat bagi masyarakat. “Kami dengan Kimpraswil juga memiliki acuan peraturan sendiri dalam melaksanakan tugas kami merawat dan melestarikan sungai sebagai sumber air bagi masyarakat luas,” tuturnya.

Berbeda dengan Kimpraswil yang membuat aturan sendiri dalam bentuk RDTRK, BBWS lebih mengacu kepada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 28/PRT/M/2015 tentang Penetapan Garis Sempadan Sungai dan Garis Sempadan Danau. Ketika ditanya mengenai implementasi peraturan yang ada didalamnya dengan kondisi yang terjadi di bantaran Kali Code, ia mengaku kondisi yang terjadi di bantaran Kali Code melanggar apa yang ada di dalam peraturan tersebut. “Di dalam peraturan tersebut jelas tertulis sungai yang kedalamannya 3 hingga 20 meter garis sempadannya harus 15 meter. Kali Code masuk kategori sungai tersebut.

Namun yang terjadi di sana memang tidak sesuai dengan yang ada di peraturan itu. Pemunduran permukiman yang

terjadi di Jogoyudan dapat menjadi contoh. Semula jarak sempadan disana hanya satu setengah meter. Kemudian diadakan proyek pemunduran itu jadi tiga meter. Sebetulnya sesuai peraturan harus 15 meter, tetapi kami juga memperhatikan hak hidup orang banyak. Jika kami ngotot menetapkan 15 meter, berapa ratus rumah yang akan tegusur?” jelasnya.

Sama dengan Kimpraswil, saat ini pihaknya juga sedang mengagendakan proyek penataan permukiman di pinggir sungai di seluruh wilayah DIY. Tetapi, semua itu juga membutuhkan proses. “Harus ada koordinasi dengan warga di lokasi dan institusi lain yang berwenang. Pendanaan juga harus siap. Itu sudah menjadi tujuan kami,” jelasnya dengan penuh semangat. Pihaknya juga menjalin kerjasama dengan beberapa Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dalam rangka membangun dan merawat sungai yang ada di DIY, antara lain Forum Komunikasi Daerah Aliran Sungai Gajah Wong (Forsidas), Forum Komunikasi Winongo Asri (FKWA), dan Pemerhati Kali Code.

YOGYA MACET, “MASIH” BISA BERHATI NYAM

ATANASIUS MAGNUS

“Saiki aja percaya nek Jogja ora macet,” begitu kata Peppi, salah satu pendatang yang sudah menetap puluhan tahun di Yogyakarta, Sabtu (28/11/2015) dalam redaksikota.com.

Kembali ke tahun 2008 ketika para awak Asosiasi Pengusaha Angkutan Darat (Aspada), Koperasi Angkutan Yogyakarta (Kopata), Koperasi Bina Usaha Transportasi (Kobutri), Djawatan Angkoetan Motor Republik Indonesia (Damri), dan Pusat Koperasi Karyawan (Puskopkar) membentuk PT Jogja Tugu Trans (JTT) melalui sebuah konsorsium.

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, konsorsium merupakan himpunan beberapa pengusaha yang mengadakan usaha bersama. Penyatuan organisasi ini langsung disetujui oleh Sri Sultan Hamengkubuwono X. Lahirnya PT JTT menjadi jawaban dalam rangka menyediakan pelayanan transportasi publik yang efektif sesuai Peraturan Pemerintah Kota Yogyakarta nomor 7 tahun 2012 terkait Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.

Waktu itu pada tahun 2008, Trans Jogja dikepalai oleh Poerwanto Johan Riyadi selaku direktur PT JTT. Praktis PT JTT mengurus seluruh persoalan Trans Jogja, seperti ekonomi perusahaan mengenai gaji pokok, pemberlakuan tata tertib dari pihak Dinas Perhubungan, serta manajemen sumber daya manusia yang berisi kinerja petugas halte, petugas bus, supir bus, dan juga teknisi bus. Mulai menginjak tahun 2015, terdapat pergantian operator utama dari PT JTT menjadi PT Anindya Mitra Internasional (AMI). Dengan demikian, PT JTT bekerja di bawahnya. Adanya pergantian



MAN



Armada baru Trans Jogja melintas di Jalan Gejayan Jumat (5/8).

FOTO: JEJE

operator utama ini dikarenakan pengesahan Perpu no.74 tahun 2014 tentang Trans Jogja yang harus dikelola Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) oleh Pemda DIY. Dari situ, PT AMI bekerja di bagian pemberlakuan tata tertib serta ekonomi perusahaan, sedangkan PT JTT mengambil tanggungjawab manajemen SDM Trans Jogja.

Rancangan “lawas” Trans Jogja

Kaliurang dan Bantul adalah contoh daerah di Yogyakarta yang belum tersentuh oleh Trans Jogja. Menurut Direktur Utama PT AMI Dyah Puspitawati,

daerah-daerah tersebut menjadi daerah yang cukup strategis dengan adanya lokasi-lokasi pariwisata di sana. “Yogyakarta menjadi terkenal juga salah satunya dengan tempat-tempat wisata yang menarik. Maka dari itu, di tahun 2017, PT AMI memiliki misi besar untuk merealisasikan rute-rute baru tersebut, seperti Kaliurang dan Bantul,” ucap Dyah. “Ada pula rencana kerjasama dengan PT DAMRI untuk memberikan tumpangan bagi masyarakat Yogyakarta kelak menuju bandara baru di Kulon Progo,” tambahnya.

Sebenarnya rancangan menuju Kulon Progo, Bantul, dan Kaliurang sudah ada

sejak tahun 2010. Namun, rencana itu belum masuk pada rencana pembangunan jangka panjang daerah. Maka dari itu, Pemda DIY diharapkan dapat menyetujui hal tersebut di tahun depan. “Saya yakin sebenarnya transportasi publik ini jadi solusi, ketika daerah-daerah wisata di Yogyakarta juga dapat terjangkau,” demikian pernyataan Dyah ketika ditemui di kantornya.

Sigit Wahyu Wibowo selaku Kepala Seksi Pengendalian Trans Jogja pun turut membenarkan hal tersebut. “Untuk bisa memperluas jalur Trans Jogja, butuh studi lapangan, persetujuan dengan pihak angkutan umum reguler, serta



Armada Lama Trans Jogja yang mulai dimakan usia Jumat (5/8).

FOTO: JEJE

dana dari pihak pemda. Selama ini yang sudah tercapai adalah studi lapangan dan melakukan *Focus Group Discussion* (FGD) kepada pihak-pihak pemilik angkutan reguler tersebut. Jadi tinggal menunggu dana dari pemerintah saja,” ujarnya.

Sigit juga menyatakan jika sejauh ini Pemda Kota Yogyakarta baru menyetujui penambahan 8 jalur baru di tahun 2016 (1A sampai 4B) serta 9 jalur baru di tahun 2017 untuk menjangkau tempat-tempat strategis di kota Yogyakarta. “Di tahun 2017 mendatang, diperkirakan akan ada 19 jalur baru yang siap beroperasi di dalam kota dan juga luar khususnya di wilayah *Ring Road*,” tambah Sigit. Pernyataan tersebut turut dibenarkan oleh Agus Minang Satyo selaku Kepala Dishub Yogyakarta.

Kunci ada di titik teratas dan juga masyarakat

Nur Hasan, salah satu operator PT AMI, mengatakan jika akan ada bantuan dari pemerintah pusat berupa 25 bus baru yang dikirimkan pada 28 Mei 2016 dengan kenyataan dipercepat menjadi tanggal 26 Mei 2016. Sebanyak 25 bus baru telah beroperasi dengan warna biru bermerek Hyoto seharga Rp 617 juta/bus. Total Rp. 15,425 milyar. Kepala Dishub DIY bagian Transportasi Umum dan Angkutan Darat, Sigit Haryanta, menjelaskan bahwa warna dasar biru tersebut merupakan ketentuan dari pemerintah pusat dan tidak menjadi masalah ketika dioperasikan secara bersamaan dengan bus lama yang berwarna

hijau, karena ada petugas yang memberikan panduan baik di dalam halte maupun di dalam bus itu sendiri.

Nur Hasan juga menyatakan jika sekarang ini terdapat 67 bus Trans Jogja yang beroperasi di jalanan, sedangkan ada 7 bus lainnya yang beroperasi sebagai cadangan. “Jadi jika

Rancangan menuju Kulon Progo, Bantul, dan Kaliurang sudah ada sejak tahun 2010. Namun, rencana itu belum masuk pada rencana pembangunan jangka panjang daerah.

suatu saat ada kerusakan maka ke-7 bus inilah yang akan menggantikannya,” ucap beliau saat ditemui di ruang rapat PT AMI, 12 Mei 2016.

Penambahan maupun penggantian bus Trans Jogja hanya bisa direalisasi melalui forum khusus yang dihadiri oleh Organisasi Gabungan Angkutan Darat (Organda), PT JTT, PT AMI, serta Dishub. Dyah mengatakan bahwa PT AMI tidak mampu merealisasikan perluasan jalur bila tidak ada persetujuan Pemda Kota Yogyakarta terkait hasil rapat dari forum khusus tersebut.

Pernyataan Dirut PT AMI juga diperkuat oleh Dirut PT JTT sendiri, yakni Bambang Sugiharto. Dengan kata lain, pemerintah sangat diharapkan untuk memiliki rancangan perkotaan yang jelas baik jangka pendek, jangka menengah, ataupun jangka panjang, sehingga manajemen Trans Jogja bisa lebih efektif ke

depannya mengingat Trans Jogja memindahkan rata-rata 6,5 juta penumpang per tahun dan akan mengalami penambahan.

Namun, PT AMI masih melakukan pelanggaran selama pengoperasian Trans Jogja di lapangan. Data dari salah satu petugas Dishub Kota Yogyakarta, Budiyo, bus Trans Jogja masih

memiliki kekurangan, seperti AC dalam beberapa bus tidak menyala, pintu bus yang sulit dibuka bahkan macet, cara sopir mengendarai bus yang terhitung ugal-ugalan, kemoloran waktu bus sampai di halte, serta banyak mesin yang sudah mulai tidak layak pakai yang ditandai dengan munculnya asap hitam dari knalpot.

Hal tersebut dapat dituntut oleh pihak Dishub melalui denda yang harus dibayarkan PT AMI per bulannya sesuai pelanggaran yang dibuat. “Hanya saja, terkadang kami sulit membuktikan pelanggaran-pelanggaran yang dibuat oleh PT AMI sekalipun kami sudah meletakkan petugas di beberapa titik. Maka kami mohon bantuan dari masyarakat untuk menghubungi 0822 4357 6006 (Dishub) 0819 0402 0535 (PT AMI) bila menemui kejanggalan apapun pada bus Trans Jogja,” tutur Sigit Wahyu Wibowo.

SILANG SALING UNTUNG DALAM JEJARING AKREDITASI

ACHMAD FH FAJAR

Demi reputasi dan perbaikan bersama, memperoleh predikat akreditasi A jadi harga mati.

Markus Budiraharjo, Ketua Lembaga Penjamin Mutu (LPM) Universitas Sanata Dharma (USD), melangkah ke dalam ruang kerjanya untuk menyambut janji wawancara dengan reporter **natas** pada Selasa (17/05). Waktu menunjuk pukul 13.50 WIB ketika Markus tiba. Ruang kerjanya sepi, hanya dihuni dua orang staf. Mengenakan kemeja berwarna biru tua dengan bawahan celana kain hitam, Markus mengaku tidak memiliki banyak waktu untuk sesi wawancara kedua tersebut. Dia memberi sepuluh menit tanya jawab dan setelahnya dia harus mengajar lagi. Sebelum memenuhi janji wawancara, dia

baru saja menyelesaikan rapat jajaran pendidik di prodi PBI (Pendidikan Bahasa Inggris). Hari-harinya sibuk, tidak hanya tugas mengajar tapi juga kewajiban mendukung pengajuan akreditasi tingkat universitas.

Menurut Markus, akhir Juli merupakan tenggat waktu pengumpulan data-data yang diperlukan untuk pengajuan akreditasi USD. Jika dirangkum, terdapat tujuh hal yang harus terlampir dalam borang (berkas) yang diajukan. Dia harus *ngalor-ngidul*, melakukan studi banding di universitas-universitas lain, untuk menyelesaikannya. Sebagai Ketua LPM USD, dia disertai tanggung jawab “memaknai” data persepsi dari seluruh lini kampus Yesuit tersebut. Namun, Markus tetap rendah hati dengan

tidak bersedia menyebut kerjanya paling berat di antara tim, bahkan mengaku diringankan oleh jajaran pemimpin universitas yang bervisi tinggi. “Akreditasi ini tanggung jawab semua pihak Sanata Dharma,” terang Markus.

Pelaksana Akreditasi Institusi Perguruan Tinggi (AIPT) adalah BAN-PT (Badan Akreditasi Negara Perguruan Tinggi), sebuah lembaga mandiri





Auditorium megah yang menjadi ikon baru USD Minggu (31/7).

FOTO: JEJE

yang berada dalam naungan Kemenristekdikti (Kementerian Riset dan Teknologi Perguruan Tinggi). Menurut Markus AIPT bertujuan memberi penilaian setiap universitas sebagai panduan masyarakat oleh negara. "Kasarannya, gengsi negara atau reputasi," jelas Markus.

Umumnya, periode AIPT berjangka lima tahunan. Namun, melihat beberapa peningkatan USD akhir-akhir ini, seperti

prestasi mahasiswa tingkat nasional, maka pemerintah memberikan kesempatan dan mengundang USD untuk memperbaikinya pada tahun ini. Sebagai informasi, rekam jejak USD dalam AIPT dua kali mendapat rangking B. Penilaian yang kedua itu diputuskan dalam SK/BAN-PT/2013.

Ditanya tentang efek pelaksanaan AIPT, Markus meyakini hasil akreditasi

merepresentasikan kondisi universitas. Untuk penerima hasil AIPT tidak hanya lembaga saja, melainkan juga mahasiswa dan lulusan. Sebagai contoh, universitas yang berakreditasi A akan berkesempatan memperoleh tambahan calon pelamar (mahasiswa baru). Sedangkan untuk mahasiswanya bakal mudah melamar pekerjaan. "Kepemimpinan di sebuah lembaga yang berakreditasi A

itu pasti bagus, *kok*. Karena untuk dapat A, integritas kepemimpinan pasti tercapai,” kata dosen prodi PBI itu.

Markus menyadari kenyataan tersebut sangat kejam. Namun, bagaimanapun hal itu telah jadi tuntutan zaman. “Akreditasinya apa, *gitu* tanyanya. *But, that’s the game that we need to play. There’s no way out,*” jelas Markus.

Jajaran Pemimpin USD

Tim Akreditasi USD bergairah menyambut AIPT tahun ini. Mereka bekerja keras mengumpulkan, menyusun, dan melengkapi borang. Berbekal kelebihan dan kelemahan institusi, Markus merasa tahun ini merupakan “momentum perbaikan bersama” paling tepat.

Johanes Eka Priyatma, Rektor USD, mendukung sepenuhnya pengajuan USD untuk AIPT. Keputusan tersebut semakin bulat setelah *rembug* dengan karyawan dan pengajar USD, juga dengan perwakilan mahasiswa. Motivasi Eka mendukung keikutsertaan USD dalam AIPT tersebut adalah untuk memperbaiki reputasi USD dalam sistem pendidikan. “Gila *aja* kalau *enggak* mau ikut. Ini lembaga, *kok*,” kata rektor kampus bermotokan *competence*, *conscience*, dan *compassion* itu.

Dalam wawancara yang sempat tertunda tersebut, Eka optimistis USD dapat menaikkan nilai. Sikap tersebut bukanlah bermuluk-muluk tanpa bukti. Kepada reporter **natas** dia memamerkan data yang menyebutkan segudang prestasi mahasiswa USD, baik



Banner ajakan bersiap diri menuju akreditasi A menghiasi salah satu sudut kampus USD Jumat (5/8).

FOTO: IEIE

tingkat regional maupun tingkat nasional. Baliho di Jalan Gejayan, depan kampus Realino, yang menginformasikan USD sebagai perguruan tinggi swasta (PTS) terbaik se-Yogyakarta jadi bukti ucapan pria asal Sukoharjo itu.

“Yang menarik, dua alumni kita termasuk salah satu dari 45 wanita penembus batas oleh majalah Tempo,” ungkap pria yang pernah menjabat sebagai Dekan Fakultas Sains dan Ilmu Teknologi USD itu.

Selain prestasi-prestasi mahasiswa yang telah disebutkan Eka masih menambah indikator output USD lainnya. Salah satunya hasil uji kompetensi guru yang memberikan rerata nilai tertinggi untuk alumni USD. Namun, Eka menyebut pengumuman hasil itu tidak terbuka. Tidak jelas dengan yang dimaksud ketidakterbukaan tersebut tapi Eka berkata, “masa negeri kalah sama Sanata Dharma yang swasta, *sih*.”

Pihak Yayasan Universitas Sanata Dharma juga tidak berdiam diri dalam pelaksanaan akreditasi USD. Sebagai PTS, pihak yayasan wajib masuk dalam tim akreditasi. Keterlibatan pihak yayasan dalam akreditasi USD berkaitan dengan kepemilikan properti. “Tugas yayasan di sini mudah. Hanya mengurus tanah dan bangunan itu milik siapa,” jelas Albertus Budi Santosa, Ketua Yayasan USD.

Dengan setengah bercanda dia mengaku sebenarnya USD tidak memerlukan akreditasi A. Menurut dia, USD lebih memilih tetap rendah hati dengan berbagai prestasi yang didapat. Hanya saja, oleh sebab AIPT merupakan keharusan dari pemerintah dan undangan pengajuan AIPT pun datang dengan sendirinya, maka pihak universitas merasa perlu menindaklanjutinya. “Biasalah, Negara sepertinya malu. Masa dengan berbagai prestasi kita dapat B,” ujar pria yang akrab disapa Romo Budi itu *ceplas-ceplos*. Sebagai perwakilan yayasan dia hanya menekan persetujuan yang

berasal dari keinginan sebagian besar masyarakat USD. Lagipula, tambah Budi, banyak keuntungan yang dapat diperoleh oleh masyarakat USD dari pelaksanaan AIPT.

Sejarah dan kesimpangsiuran

Sosialisasi pertama AIPT terjadi pada 1997 untuk menilai kredibilitas program studi di perguruan tinggi. Meskipun telah disosialisasikan tetapi belum jadi suatu kewajiban. Jadi, pada awal pelaksanaan AIPT penilaian dikhususkan untuk program studi.

Kira-kira tahun 2007 diadakan akreditasi tingkat institusi. Namun, lagi-lagi prosesnya terhenti di tengah jalan; hanya berlaku selama setahun. Antara tahun 2011 atau 2012 akreditasi institusi diwajibkan. Pemerintah mewajibkan seluruh institusi perguruan tinggi untuk mengikuti akreditasi institusi dengan batas waktu sampai 2018.

Dalam wawancara pribadi dengan Koordinator Kopertis wilayah V, Yogyakarta, Bambang Supriyadi, mengatakan baru sembilan ratusan institusi dari sekitar empat ribu institusi yang sudah terakreditasi. Sedangkan untuk tingkat prodi dari jumlah total prodi, sekitar enam belas ribu, baru enam ribuan prodi yang mengikuti AIPT. “Dari Jogja, baru UII yang sudah (terakreditasi, red.). Yang lain saya tidak tahu,” kata Bambang kepada awak **natas**.

Berjalannya waktu, AIPT mengalami perkembangan. Menristekdikti, Mohammad Nasir, membentuk lembaga

akreditasi waralaba lainnya yang disebut Lembaga Akreditasi Mandiri Perguruan Tinggi (LAM-PT). Tugas LAM-PT adalah memantau dan menilai kelayakan program studi atau sekolah tinggi kejuruan. Akreditasi tingkat institusi tetap dilakukan oleh BAN-PT.

Bambang menyebut setidaknya ada tiga proses yang harus dilalui setiap prodi atau universitas dalam penilaian AIPT. Pertama, penyusunan dan pengiriman borang ke BAN-PT. Penyusunan borang tersebut memiliki pedoman yang sama. Setelah borang diterima oleh BAN-PT, maka proses selanjutnya adalah *desk evaluation* atau asismen kecukupan. Tahap terakhir, BAN-PT akan mengirimkan *assessor* untuk melakukan visitasi atau asismen lapangan.

Terdapat tujuh standar yang harus diisi oleh prodi atau institusi dalam borang yang dikirim ke BAN-PT. Pertama, visi, misi, tujuan, dan strategi. Kedua, manajemen dan organisasi. Aspek ketiga, terkait dengan mahasiswa dan lulusan. Keempat, SDM tenaga kependidikan, karyawan, dan staf. Standar kelima, kurikulum pembelajaran. Kemudian yang keenam, keuangan, sarana dan prasarana, serta sistem informasi. Yang terakhir, penelitian, pengabdian, dan kerjasama.

Bambang mengungkapkan tujuan dari AIPT adalah untuk memantau dan mengevaluasi pelaksanaan pendidikan di seluruh universitas. Pemerintah merasa perlu menetapkan

standar operasional yang sama bagi perguruan tinggi. Hal itu disebabkan setiap perguruan tinggi memiliki pedoman pelaksanaan operasional yang berbeda-beda.

Seperti yang dijelaskan dalam UU nomor 12 tahun 2012, setiap perguruan tinggi diberi kewenangan menyusun Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI). Supaya SPMI yang dikembangkan tetap berada dalam koridor yang diharapkan, diadakan akreditasi sebagai evaluasi atau kontrol eksternal. Dengan begitu penyusunan SPMI tersebut harus memenuhi standar nasional perguruan tinggi yang ditetapkan BAN-PT. Standardisasi yang telah ditetapkan itu wajib diikuti dan tidak boleh dilanggar. “Tolok ukurnya sama. Baik untuk PTN (Perguruan Tinggi Negara) maupun PTS tidak ada perbedaan,” jelas Bambang.

Yang menarik dari keseluruhan penjelasan Bambang mengenai perangkingan institusi terletak pada pandangannya mengenai predikat USD sebagai PTS terbaik nomor dua di Indonesia oleh Kemenristekdikti. Bambang mengatakan USD dapat memperoleh peringkat terbaik hanya karena tidak semua PTS, total sekitar empat ribuan, mengirimkan berkas yang dibutuhkan ke Kemenristekdikti. Peningkatan itu hanya menilai empat segi: manajemen, SDM, pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi, dan prestasi mahasiswa. Dari penuturan Bambang dapat disimpulkan bahwa peringkat terbaik USD hanya sebuah kebetulan yang

diraih dari segi kelengkapan administrasi.

Lebih lanjut, Bambang menuturkan akan adanya perbaikan pemeringkatan institusi oleh Direktorat Jendral (Dirjen) Kemenristekdikti. Itu dilakukan karena penilaian sebelumnya dianggap tidak *fair* atau telah ditetapkan ketika belum semua institusi mengirimkan data. “Tidak *fair* kalau datanya tidak lengkap terus dinilai,” tutur Bambang.

Perangkingan institusi oleh Dirjen Kemenristekdikti berbeda dari akreditasi institusi yang dilakukan BAN-PT. Padahal, seperti yang telah diketahui BAN-PT berada dalam naungan Kemenristekdikti. Lalu, mengapa dalam satu departemen terdapat dua penilaian yang mirip fungsinya?

Perangkingan tersebut tentu menambahi daftar kesimpangsiuran mengenai fungsi suatu departemen di era pemerintahan Jokowi. Seperti jamak diketahui pemerintah telah memecah dua departemen (Kemenristekdikti dan Kemdikbud, red.) yang sama-sama mengurus institusi. Namun, dari semua ketidakpastian tersebut, dapat dipastikan bahwa perangkingan institusi hanya persoalan siapa yang mengeluarkan putusan dan aspek apa saja yang dinilai. Lebih sederhananya, institusi yang dinilai baik oleh suatu badan belum tentu baik dalam penilaian badan lainnya.

Suara alumni

Berbagai tanggapan berbeda mewarnai pelaksanaan AIPT

USD. Ada yang menganggap keberadaan AIPT sangat penting, tapi ada juga menganggapnya biasa-biasa saja. Pro dan kontra tanggapan tersebut juga terdapat dalam diri lulusan atau Alumni Sanata Dharma.

Standardisasi AIPT juga memasukkan kriteria lulusan. Demi memenuhi kolom borang tentang lulusan, pihak USD membuat survei online melalui *Google Docs* (sekarang sudah tidak dapat diakses) untuk lulusan USD tahun 2014-2015. Daftar pertanyaan survei tersebut mencakup perihal seperti biodata diri, tahun kelulusan, dan profesi lulusan.

Gabriela Melati Putri, alumna tahun 2016 yang sempat menjadi Humas USD sebelum lulus, mengatakan pelaksanaan akreditasi penting untuk keberlangsungan universitas. Menurut lulusan prodi Sastra Indonesia (Sasindo) itu akreditasi dilaksanakan untuk menjamin mutu perguruan tinggi. “Kalau akreditasi bagus, berarti universitas terjamin juga mutunya,” ungkap dara asal Jakarta itu.

Wanita yang akrab disapa dengan Gaby itu menjelaskan USD sangat memperhatikan alumni. Perhatian tersebut salah satunya dibuktikan dengan pemberian akses seumur hidup di perpustakaan kampus. “Di Sasindo, alumni pasti jadi pembicara di HAKSI (Hari Akrab Sasindo). Waktu *English Action Day* (EAD), Pongki Barata diundang *ngisi* acara,” kata Gaby.

Meskipun tidak mau menyebutkan kepantasan USD naik *grade* di AIPT, menurut

Gaby USD secara keseluruhan punya banyak kualitas. Mulai dari kontribusi dosen di masyarakat, sarana-prasarana kampus, sampai administrasi yang ramah. Namun, dia juga mengakui ada beberapa hal di USD yang perlu diperbaiki. “Terutama fasilitas internet yang cuma kencang di beberapa tempat dan buku-buku perpustakaan yang perlu dilengkapi,” jelas Gaby.

Rechardus Deaz Prabowo, alumnus prodi Sejarah tahun 2014, berpendapat akreditasi bertujuan untuk melihat tingkat keterserapan lulusan di dunia kerja. Menurutnya, tingkat keterserapan tersebut merupakan salah satu indikator baik atau tidaknya mutu universitas. Selain itu, hasil tersebut pun dapat menjadi modal utama mempromosikan universitas dalam hal rekrutmen mahasiswa baru.

Pria yang bernama kecil Deaz itu mengatakan perhatian USD terhadap lulusannya kurang maksimal. Hal itu didasari oleh kurangnya persiapan yang diberikan universitas kepada mahasiswa untuk menggeluti dunia kerja sesuai bidang keilmuan yang diambil. Dia mencontohkannya dengan bekas prodinya sendiri, prodi Sejarah. Menurut Deaz prodi tersebut kurang sekali mengadakan kunjungan, magang, dan melakukan kerjasama dengan lembaga atau organisasi lainnya seperti ANRI, Perpustakaan, BPAD, LIPI, serta KITLV. “Inilah yang menyebabkan lulusan Sejarah USD kebingungan mencari kerja serta banyak yang bekerja di luar bidang keilmuannya,” tutur Deaz.

Pendapat berbeda disuarakan seorang lulusan USD tahun 2105, sebut saja Jarot (nama samaran). Dia agak menyangsikan keakuratan nilai tersebut. “Akreditasi memang bisa dijadikan meteran untuk melihat kualitas universitas, tapi nilai adalah nilai. Kita tidak tahu bagaimana nilai tersebut diperoleh, juga bagaimana dinamika pascaakreditasi,” kata Jarot.

Dia mencontohkan gambaran di lingkungan mantan prodi yang pernah jadi tempat belajarnya, untuk keterangan prodi yang dimaksud Jarot tidak mau memberitahukan. Jarot berpendapat mahasiswa di prodi yang dia maksud cenderung biasa-biasa saja dari segi nilai akademik, minim pengalaman di kegiatan level universitas, dan hanya melulu ikut serta dalam kegiatan prodi yang tidak terlepas dari campur tangan prodi bersangkutan. Namun, yang mengherankan Jarot prodi yang dikisahkannya itu mendapat akreditasi A.

Lalu, bagaimana dengan akreditasi tingkat institusi? Secara terbuka Jarot menganggap USD layak mendapat akreditasi A, tetapi hanya dari segi sistem saja. “Maksudnya, layak dalam konteks lembaga pendidikan yang sukses mencetak pekerja, karyawan, dan mesin-mesin pencetak uang lainnya,” ujar Jarot.

Kemunculan perbedaan anggapan tersebut lumrah dan sah-sah saja. Tim AIPT USD pun menyadari kemungkinan itu. Seperti yang dijelaskan Markus

pendapat mengenai baik atau buruknya suatu kebijakan hanya persoalan sudut pandang dan dipengaruhi karakter individu.

Sebagai salah seorang anggota Tim AIPT USD Markus seolah mengenyahkan kritikan yang timbul dan memilih tetap maju pada keyakinannya. Dengan penguatan data yang dikumpulkan, dia mengakui sampai saat ini kerja institusi belum mampu mencukupi kebutuhan mahasiswa. Namun, dia meyakini kejituan sikap optimistis. “Yang dibutuhkan adalah orang dengan filsafat ilmu pengetahuan yang cukup tinggi untuk bisa menempatkan hal yang tampaknya negatif dan jelek itu dalam kerangka perspektif bahwa kita punya optimisme,” terangnya.

Dia melanjutkan meskipun tampak luaran AIPT sekadar penguatan reputasi atau gengsi Negara, tapi hal itu tetap dibutuhkan khususnya sebagai panduan masyarakat dan legalisme institusi. “Memang kasarannya gengsi atau reputasi. Sebenarnya bukan itu, tapi kualitas pelayanan yang lebih baik, yang berbasis data,” jelas Markus. Lebih lanjut Markus juga mengungkapkan harapan pribadinya terhadap pelaksanaan AIPT untuk USD. “Kita memang bercita-cita dapat A tetapi jujur saja kita mau tampil apa adanya. Tampil untuk siap belajar terus menerus,” kata Markus.

OPTIMALISASI KINERJA DOSEN

KONSITA BELAROSA

Sebagai suatu lembaga pendidikan tinggi yang telah berkiprah selama lebih dari 60 tahun, Universitas Sanata Dharma terus melakukan peningkatan kualitas pendidikan dengan berbagai cara. Salah satunya ialah peningkatan mutu dosen. Dosen dianggap sebagai salah satu faktor penting penentu kualitas suatu lembaga pendidikan tinggi.



Suasana Kampus Realino lengang saat liburan panjang semester genap Jumat (5/8).

FOTO: JEJE

Dalam Undang-Undang nomor 14 tahun 2005, pasal 1 ayat 2 dituliskan dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan yang tugas utamanya adalah mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat (UU Guru dan Dosen: 2009). Pada undang-undang tersebut dengan jelas dituliskan dosen adalah “pendidik profesional”. Hal ini mempunyai arti bahwa dosen tidak hanya sekedar menjadi seorang pendidik biasa, tetapi ia yang memiliki keahlian lebih sehingga disebut profesional.

I Nyoman Sudiana, dalam Jurnal Pendidikan dan Pengajaran IKIP Negeri Singaraja, mengemukakan bahwa kualitas suatu Perguruan Tinggi (PT) tidak lepas dari pembicaraan profesionalisme dosen. Dosen sebagai salah satu komponen PT berperan sangat besar dalam mewujudkan kualitas PT. Ia juga mengemukakan bahwa di era globalisasi sekarang ini, perguruan tinggi memerlukan adanya peningkatan kualitas proses pembelajaran dalam rangka menghasilkan lulusan yang bermutu. Oleh karena itu, dituntut adanya peningkatan profesionalisme dosen.

Sofian Efendi juga dalam bukunya yang berjudul *Pengelolaan Perguruan Tinggi Menghadapi Tantangan Global* menuturkan bahwa PT sebagai lembaga penyelenggara

pendidikan tinggi memiliki peranan yang sangat besar dalam kerangka pembangunan nasional dan daerah, termasuk mempersiapkan calon-calon pemimpin bangsa yang bermoral tinggi serta berbudaya demokratis. Secara tidak langsung, hal ini memiliki arti dosen mempunyai peranan penting dalam perkembangan suatu negara. Dosen bukan hanya mengajar sebatas teori dan aplikasinya dalam kehidupan nyata, tetapi bagaimana sebisa mungkin agar mahasiswanya memiliki moral yang tinggi serta dapat menjunjung tinggi budaya demokrasi dalam kehidupannya sebagai masyarakat.

Ditemui pada Kamis (26/05) yang lalu, salah seorang dosen pada program studi Pendidikan Bahasa Inggris juga menuturkan dosen harus memiliki cerminan sebagai seorang pedagogi yang baik. “Pendidik itu yang punya hati, artinya mengajarnya dengan hati. *Kerasa kok* mahasiswa itu, diajari oleh dosen dengan hati atau tidak dengan hati,” tuturnya. Pendapat lain juga diutarakan oleh Johanes Andik, seorang mahasiswa IPPAK Universitas Sanata Dharma. Ia mengatakan bahwa dosen yang baik ialah yang mengerti keadaan mahasiswa. “Jadi mereka mengajar bertitik tolak dari keadaan mahasiswa, mampu memahami mahasiswa, dan dapat mengajar lebih menarik serta kreatif,” katanya. “Percuma kalau berpendidikan tinggi, tetapi tidak bisa mengolah keadaan mahasiswa,” lanjutnya.

Sistem evaluasi dosen

Setiap enam bulan sekali,

diadakan sistem evaluasi dosen secara *online* di Universitas Sanata Dharma. Evaluasi dosen yang diadakan secara *online* ini lebih mengarah pada evaluasi pengajaran para dosen, di mana kualitas pengajaran para dosen selama satu semester akan dilihat dari sistem evaluasi yang diisi oleh para mahasiswa. Dosen yang dievaluasi bukan hanya dosen tetap Sanata Dharma, tetapi semua dosen tanpa terkecuali. Sistem evaluasi yang dilakukan ini sudah berlaku semenjak tahun 2007 dan setiap tahun terus-menerus mengalami perbaikan alatnya.

Evaluasi dosen diadakan tentu saja memiliki suatu tujuan. Seperti yang ditulis oleh Markus Budiraharjo selaku ketua Lembaga Penjamin Mutu



Universitas Sanata Dharma pada laman untuk evaluasi dosen, yaitu, evaluasi pembelajaran akhir semester merupakan hal yang dinilai penting untuk dilakukan dengan dua alasan pokok. Pertama, mahasiswa berkontribusi secara optimal untuk peningkatan kualitas pelayanan dengan memberikan umpan balik atas kualitas pembelajaran terhadap dosen tiap semesternya.

Kedua, perbaikan berkelanjutan sangat ditentukan oleh kualitas data yang dikumpulkan dari para mahasiswa terhadap kinerja dosen dalam hal pengajaran dan pembelajaran. Artinya, kualitas pembelajaran di USD sangat dipengaruhi oleh kerja sama semua pihak, termasuk di

antaranya adalah masukan dari mahasiswa.

Alat evaluasi pembelajaran yang diberlakukan USD selama ini juga perlu ditinjau ulang. Oleh sebab itu, Markus juga berharap agar para mahasiswa dapat berkontribusi aktif dalam pengisian sistem evaluasi dosen. Pengisian sistem evaluasi dosen tersebut menjadi salah satu cara untuk meningkatkan kualitas alat tersebut sehingga memberikan data untuk menguji validitas (kesahihan) dan reliabilitas (keandalan) dari alat itu.

Terkait evaluasi dosen yang telah dilakukan tahun lalu, pihak Lembaga Penjamin Mutu Universitas Sanata Dharma menemukan data, bahwa ada beberapa dosen mendapatkan nilai terendah dari keseluruhan

dosen yang dievaluasi. Dosen yang mendapat nilai yang rendah kemudian diserahkan ke kaprodi yang bersangkutan untuk diproses lebih lanjut. Dosen-dosen yang mendapat nilai rendah kemudian nantinya diajak “ngobrol” agar bisa memperbaiki kekurangannya. Tidak ada sanksi bagi para dosen yang diangkan rendah pada sistem evaluasi untuk pengajaran. Mereka hanya dibimbing agar lebih bertindak sesuai dengan yang diharapkan mahasiswa. Hanya saja, mungkin tidak semua dosen dapat berubah secara cepat. Seperti yang dikatakan Scholastica Wahyu Indriani, salah seorang mahasiswa di Universitas Sanata Dharma, “beberapa dosen melakukan perubahan metode pembelajaran menjadi keinginan mahasiswa setelah dievaluasi, tetapi beberapa dosen cara mengajarnya tetap sama, tidak ada perubahan”.

Sebagai pembuat kebijakan, Markus Budiraharjo berpendapat bahwa indikator penilaian dosen pada sistem evaluasi dosen tidak subyektif baginya. Hal itu dikatakan karena ia meyakini bahwa realitas terbentuk dari serangkaian subyektifitas. “Dari konsep teori subyektifitas, diyakini bahwa subyektifitas A, subyektifitas B, dan subyektifitas C. Ketika itu diakumulasikan itu namanya intersubyektif. Nah, intersubyektif itu kalau teman-teman dari ilmu alam mengatakan obyektif. Tergantung ilmunya, kalau saya lebih meyakini itu,” tegasnya.

Markus juga berpendapat bahwa tidak masalah jika orang punya keyakinan berbeda dan



Sekelompok mahasiswa USD berdinamika bersama di salah satu sudut kampus Jumat (5/8)

FOTO: JEJE

punya pendapat yang lain. Tetapi ketika ia berada dalam posisi pembuat kebijakan, ia akan terus melanjutkannya. “Ini keyakinan saya. Silahkan anda mengkritisi, silahkan anda berpendapat, tetapi ini kebijakan saya dengan segala konsekuensinya. Mari kita jalan,” sambungnya.

Terkait sistem evaluasi dosen, Markus selaku ketua LPM USD terus berusaha untuk meningkatkan kualitas dosen. Ia akan mencoba untuk memanusiakan alat evaluasi menjadi lebih ringkas, jadi lebih terfokus ke pembelajaran. Ia juga ingin mendistribusikan evaluasi-evaluasi yang lain ke dalam rangkaian surveinya, dan memperkuat sistem informasi akademik USD.

2015 dan 2016 saja, ada 200-an orang pelamar di universitas ini, tetapi hanya sembilan orang yang diterima, meskipun dua orang di antaranya mengundurkan diri.

Pihak Biro Personalia juga menegaskan penerimaan dosen memang memperhitungkan dahulu rasio mahasiswa dosen. Setelah itu, rektorat dan kepala program studi (kaprodi) memutuskan perubahan dan penambahan data yang perlu dilakukan. Banyak hal yang dipertimbangkan. Kalau sudah ada keputusan dari rektorat mengenai jumlah dosen yang akan ditambah, barulah dari pihak Biro Personalia membuat lowongan dan menerima lamaran. *Screening* berada di tangan kaprodi, siapa yang akan dipanggil tes. Pihak Biro

Alat evaluasi pembelajaran yang diberlakukan USD selama ini juga perlu ditinjau ulang.

Penerimaan dosen baru

Selain diadakannya sistem evaluasi dosen sebagai salah satu cara peningkatan mutu mahasiswa yang dilakukan dengan perbaikan kualitas dosen, Sanata Dharma juga melakukan seleksi yang ketat bagi para calon dosen. Hanya dosen yang benar-benar sesuai dengan kriteria yang akan diterima. Berbagai tahap demi tahap penyeleksian dilakukan agar terpilihlah dosen yang berkualitas. Biro Personalia Universitas Sanata Dharma mengemukakan bahwa di tahun

Personalia hanya akan membuat rekapnya.

Salah satu program studi di Sanata Dharma yang membutuhkan cukup banyak dosen baru ialah Pendidikan Bahasa Inggris (PBI). Awal tahun 2015, prodi PBI membutuhkan sekitar 7 orang dosen, tetapi baru 3 orang yang diterima. Meski demikian, Kaprodi PBI Paulus Kuswando mengatakan bahwa untuk saat ini rasio dosen di PBI masih baik. Ia juga mengatakan bahwa pelamar terus berdatangan, hanya saja banyak





Loket pendaftaran Insadha 2016 dipadati mahasiswa baru Jumat (5/8).

FOTO: JEJE

yang tidak lolos seleksi. “Jadi yang melamar di PBI kemarin ada 12 orang. Mereka kita panggil, kemudian dites. Jadi, sebenarnya, siapa pun dipanggil asal IPK-nya baik dan juga ada keterlibatan akademik serta non akademik saat kuliah. Kemudian para pelamar melakukan tes Bahasa Inggris dan tes psikologi. Tes psikologi inilah yang sangat menentukan. Jadi di sana akan dilihat, apakah pelamar itu sangat disarankan, disarankan, masih disarankan, atau kurang disarankan,” katanya.

Tes psikologi menjadi saksi banyaknya pelamar yang berhenti di tengah jalan. “Tingkat akurasi tes psikologi ini cukup tinggi menurut saya, sehingga kami sangat mempercayai tes ini. Dari sekian belas orang yang melamar, sampai sekarang belum ada yang memenuhi standar. Ada satu dua pelamar, tetapi ketika sampai dites psikologi, gagal.” Sambung Paulus Kuswandono yang lebih akrab dipanggil Pak Kus oleh mahasiswa Pendidikan Bahasa Inggris. Ia mengatakan bahwa para pembuat soal memakai ilmu khusus sehingga soal sangat bermutu dan berbobot. “Mereka yang membuat soal sudah sampai pada level doktoral untuk mempelajari *item* tes tersebut. Sudah jatuh bangun, mereka juga telah melakukan uji coba berkali-kali. Oleh sebab itu, saya sangat percaya pada tes psikologi di Sanata Dharma,” jelas Kuswandono.

Seorang dosen baru dari program studi Pendidikan Fisika, Albertus Hariwangsa Panuluh juga berpendapat bahwa dibutuhkan proses yang panjang

sebelum menjadi dosen baru di Sanata Dharma. “Prosesnya lama. Dulu saya pertama-tama menyerahkan berkas dari pihak Biro Personalia, satu bulan kemudian baru dihubungi, setelah itu saya tes bahasa Inggris dan tes psikologi. Tes psikologi juga memakan waktu yang cukup lama, mulai sekitar pukul 08.00 WIB - 12.00 WIB, dan setelah itu wawancara langsung dengan dosen psikologi. Bulan depan saya dinyatakan lulus, kemudian dipanggil lagi untuk tes dengan kaprodi dan dekan, serta melakukan tes *micro teaching*. Bulan depan lagi, saya dinyatakan lulus dan harus wawancara dengan pihak rektorat dan yayasan. Setelah itu, tes kesehatan sebagai tes paling akhir sebelum dinyatakan lulus menjadi dosen di Sanata Dharma.”

Serangkaian tes yang tidak mudah memang dilakukan Universitas Sanata Dharma agar mendapatkan dosen yang terbaik. Meski dibutuhkan banyak dosen, bukan berarti kampus ini mau dengan sembarangan memilih dosen. “Kami mencari pendidik, bukan pengajar. Pendidik itu mengajar dengan hati bukan karena ini adalah suatu pekerjaan.” Tegas Paulus Kuswandono yang saat ini menjabat sebagai Kaprodi Pendidikan Bahasa Inggris, Universitas Sanata Dharma Yogyakarta.

FILOSOFI HAMEMAYU HAYUNING BAWANA YANG MULAI TERLUPAKAN

KRISTOFORUS BAGAS*



Salah satu filosofi dari masyarakat Yogyakarta dan menjadi panduan bagi kegiatan pemerintahan daerah terutama dalam bidang pembangunan adalah *Hamemayu Hayuning Bawono*. Kata *Hamemayu* atau *memayu* adalah kata kerja, yang artinya “membuat ayu” atau mempercantik, memperindah. Sedangkan kata *Hayuning* merupakan kata sifat, yang artinya ayu, cantik atau indah. Lalu kata *Bawana* mempunyai arti benua atau bumi. Jadi arti harafiah dari

Hamemayu Hayuning Bawana adalah “menjaga keayuan bumi yang tercipta ayu sebagaimana adanya”.

Kata “bumi” dalam hal ini mempunyai arti ganda, yaitu bumi dan isinya secara fisik atau ekosistem serta kehidupan di bumi. *Hamemayu Hayuning Bawana* secara utuh merupakan falsafah, tujuan dan landasan hidup manusia di bumi. Falsafah ini diperkenalkan oleh Pujangga Besar Ranga Warsita. Filosofi tersebut yang notabene dipakai oleh Yogyakarta sebagai pedoman kegiatan pemerintahan tentunya mempunyai tujuan

tertentu yang ingin dicapai. Tujuan tersebut merupakan keinginan dari para pendahulu agar menjadi sebuah daerah yang maju dalam pembangunan, tetapi senantiasa menjaga lingkungan hidupnya.

Pengelolaan lingkungan hidup yang bijaksana sesungguhnya menjadi fokus perhatian dari pembangunan yang ada di Yogyakarta, dengan didasari dari filosofi tersebut. Penggunaan filosofi tersebut menciptakan kekhasan dan keunikan tersendiri bagi pembangunan lingkungan yang ada di Daerah Istimewa Yogyakarta. Salah satu hal nyata

yang dahulu diterapkan oleh Pangeran Mangkubumi melalui filosofi *Hamemayu Hayuning Bawono* terkait konsep tata ruang adalah konsep *sumbu nyegara gunung*. Tata ruang yang dibuat sedemikian rupa dengan menggunakan nilai-nilai kearifan lokal dari falsafah Jawa yang dimilikinya dengan maksud untuk selalu menjaga dan memanfaatkan semuanya dengan baik serta tidak berlebihan.

pariwisata, industri, dan pendidikan menjadi kurang waspada dalam mengelola sumber daya yang sudah ada. Di sektor pariwisata sendiri, dengan dalih menopang sarana dan prasarana pariwisata, pembangunan hotel untuk tempat penginapan wisatawan menjadi tidak terkendali. Investor bisa saja dengan mudah membangun hotel di lahan yang terbatas. Menurut

Hal lain yang semakin membuat kota tersebut menjadi langka sumber daya air tanah adalah maraknya pembangunan mal-mal besar. Hingga Desember 2014 terdapat enam pusat perbelanjaan yang beroperasi dan juga pada tahun 2015 yang lalu telah ada enam mal baru, salah satunya adalah terbesar di Jawa Tengah dan DIY (Kompas.com, 2 Februari 2015). Banyaknya mal yang beroperasi, selain menyebabkan kerusakan lingkungan juga merusak tatanan sosial dan ekonomi masyarakat yang selama ini berpegangan teguh kepada nilai-nilai budaya Jawa.

Pasar tradisional serta warung kecil milik warga kini kehilangan eksistensinya, karena masyarakat lebih memilih mal sebagai tempat berbelanja mereka. Pudarnya eksistensi pasar tradisional dan warung-warung kecil membuat pudar pula komunikasi yang terjadi antar masyarakat, dalam nilai-nilai kemasyarakatan yang ada pada pasar tradisional juga akan menghilang. Sebagai contoh proses tawar-menawar pada pasar tradisional, dengan menganut nilai-nilai budaya yang istimewa dan luhur. Selain itu, pasar tradisional juga dapat dijadikan sebagai tempat ruang publik, karena hampir dari sebagian kalangan masyarakat manapun dapat bertemu dan berinteraksi. Serta banyaknya mal pun menyebabkan tingkat konsumerisme masyarakat meningkat dan cenderung tidak sesuai dengan kondisi ekonomi masyarakat Yogyakarta pada umumnya. Dalam hal lain, mal hanya bisa dimasuki oleh

Pengelolaan lingkungan hidup yang bijaksana sesungguhnya menjadi fokus perhatian dari pembangunan yang ada di Yogyakarta, dengan didasari dari filosofi Jawa.

Namun, realita yang terjadi sekarang adalah penataan ruang yang telah diatur sedemikian rupa dengan melihat kearifan lokal berubah menjadi penataan ruang yang semena-mena dan lebih mengejar keuntungan ekonomi semata. Semangat dari *Hamemayu Hayuning Bawono* dalam pembangunan era kontemporer ini semakin tidak terdengar. *Hamemayu Hayuning Bawono* kini umpamanya hanya sebatas warisan retorika dari para leluhur tanpa diimplementasikan secara sungguh-sungguh oleh pihak yang berwenang dalam melaksanakan pembangunan di Yogyakarta.

Dalam konteks kota tersebut yang rencana pembangunannya menekankan pada sektor

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Yogyakarta untuk tahun 2005 - 2025, peningkatan kualitas dan kuantitas hotel terjadi cukup signifikan. Selain itu, untuk pemenuhan kebutuhan pangan bagi wisatawan juga membuat menjamurnya restoran dan tempat-tempat makan modern, sehingga akan menggeser lapak dagang bagi para pemilik warung-warung makan kecil maupun penginapan-penginapan kecil. Hal ini terjadi karena para pemilik rumah makan maupun penginapan kecil tersebut kalah modal dengan para investor yang menginvestasikan dananya pada usaha kuliner restoran modern dan jasa penginapan hotel.



Kritikan Jogja Asat dalam salah satu mural di Jembatan Kewek.

kalangan tertentu dalam hal ini adalah kalangan menengah ke atas.

Masalah pembangunan yang lain adalah mulai banyaknya pembangunan apartemen dan tentunya juga akan mengganggu lingkungan. Pembangunan apartemen dilakukan untuk memenuhi kebutuhan tempat tinggal bagi masyarakat yang *nglaju* atau mahasiswa yang berasal dari luar Yogyakarta. Semakin terbatasnya lahan yang tidak sepadan dengan peningkatan jumlah penduduk akibat urbanisasi membuat penyediaan permukiman kurang memungkinkan dilakukan secara horizontal seperti pada permukiman pada umumnya. Alternatif yang dipakai adalah penyediaan permukiman atau hunian secara vertikal dengan membangun apartemen.

Apartemen yang ada nantinya tidak akan mungkin dihuni oleh masyarakat Yogyakarta, tetapi

akan dihuni oleh para pendatang yang artinya masyarakat lokal tidak akan merasakan hasil dari pembangunan yang ada. Padahal pembangunan yang baik adalah pembangunan yang berdampak positif dan meningkatkan kesejahteraan bagi masyarakat sekitarnya. Hunian vertikal seperti apartemen juga belum sesuai diterapkan pada masyarakat budaya Jawa. Hunian vertikal membuat interaksi sosial masyarakat akan cenderung menjadi interaksi bersifat *patembayan* atau hanya karena keuntungan semata, tidak mendasarkan pada ikatan kekeluargaan. Kehidupan hunian vertikal kurang memberikan keleluasaan berinteraksi bagi para penghuninya, mereka yang tinggal di tempat-tempat tersebut cenderung bertemu saat pergi dan pulang bekerja atau kuliah.

Contoh-contoh di atas menunjukkan bagaimana pembangunan Yogyakarta kini

dijalankan. Bangunan tinggi serta *crane* menjadi penghias langit-langit Yogyakarta yang membuat kesan keramahan dari provinsi ini menjadi hilang. Masyarakat asli Yogyakarta sendiri saat ini mulai tergusur di tanah mereka akibat lahan-lahan yang ada lebih dimanfaatkan untuk bangunan komersil seperti hotel dan mal.

Oleh karena itu, sebagai manusia yang diciptakan dengan kemampuan dan kekuasaan yang lebih tinggi daripada makhluk lainnya, di bumi sudah seharusnya mengimplementasikan *Hamemayu Hayuning Bawono*. Bumi dan alam diciptakan dengan segala keindahan dan manusia hanya diutus untuk menjaga keindahannya bukan justru merusak tata keindahan yang sudah ada.

*Penulis adalah mahasiswa Program Studi Pendidikan Sejarah 2013



Sekelompok anak sedang bermain di Kampung Romo Mangun Senin (25/7).

FOTO: JEJE

DONGENG MIRIS PENDIDIKAN KITA

JUDHA JIWANGGA

Ingatkah anda dengan grup band rock *Deep Purple*? Sebuah kritik tajam tentang pendidikan telah muncul dari tangan grup band *Deep Purple*. Dengan tegas, pedas, dan tidak tanggung-tanggung dalam salah satu lirik lagunya yang berjudul *Another Brick The Wall*, *Deep Purple* mengatakan *we don't need more education* (kami tidak membutuhkan lagi pendidikan).

Mereka menganggap bahwa pendidikan hanya mendidik robot-robot yang sepeham dengan ide yang diseragamkan, sedangkan pemanusiaan yang penuh kebebasan tak pernah diakomodasi oleh sekolah. Namun, ketika mencermati ide tersebut, kita perlu juga menilik konteks pendidikan negeri kita ini, Indonesia. Lalu kita bisa bertanya, apakah pendidikan

kita sudah memartabatkan manusia-manusia Indonesia atau hanya menjadi pemanis visi-misi bernegara yang tak pernah terwujud dalam realisasinya?

Berdasarkan ringkasan agenda Jokowi-JK yang disingkat Nawa Cita, arah kebijakan pendidikan sudah ditujukan untuk peningkatan kualitas yang semakin baik. Hal tersebut tertuang dalam butir lima dan delapan yang dijelaskan sebagai berikut; 5. Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia melalui peningkatan kualitas pendidikan dan pelatihan dengan program “Indonesia Pintar” dengan wajib belajar 12 tahun bebas pungutan; dan 8. Melakukan revolusi karakter bangsa melalui kebijakan penataan kurikulum pendidikan nasional.

Namun, visi-misi yang terkandung dalam Nawa Cita tersebut seakan-akan terpatok ketika menilik kembali Hasil Uji Kompetensi Guru (UKG) 2015 yang dikeluarkan oleh Direktorat Jendral Guru dan Tenaga Kependidikan KEMENDIKBUD. Berdasarkan hasil UKG 2015, hanya ada 7 dari 34 provinsi yang mendapat nilai terbaik dan mencapai standar kompetensi minimum nasional, yaitu rata-rata 55. Selain itu, hanya Daerah Istimewa Yogyakarta yang nilainya di atas rata-rata nasional untuk bidang pedagogis (Majalah Tempo, 25 April - 1 Mei 2016).

Setelah membandingkan agenda kebijakan dan fakta lapangan, pendidikan Indonesia masih belum bisa menunjukkan perkembangan signifikan. Pendidikan Indonesia hanya

tampak manis dalam bingkai administrasi birokrasi dan nihil dalam praktik lapangan. Pendidikan Indonesia hanya menjadi mimpi di siang bolong yang tak pernah tampak keberadaan riilnya.

Jika kita melihat praktik lapangan terutama di sekolah-sekolah, pendidikan hanya diwujudkan sebagai upaya transfer ilmu dan pemenuhan administrasi. Ketika di kelas, kebanyakan guru hanya mendikte ilmu-ilmu dari berbagai sumber untuk dimasukkan ke dalam kepala para siswanya. Yang lebih miris lagi adalah ketika penilaian akreditasi ke sekolah, seakan-akan panggung sandiwara terjadi. Sekolah-sekolah berlomba-lomba untuk memamerkan kebaikannya saja dan seakan-akan menutupi aib-aib yang berkembang di sekolahnya. Bahkan, tak sungkan-sungkan, aksi rekayasa dan manipulasi pun bisa terjadi hanya untuk momentum akreditasi.

Lalu, siapa yang menjadi korbannya? Para siswalah yang harus menanggung dosa dari praktik pendidikan yang kotor. Mereka telah terampas kebebasan dan nuraninya hanya untuk citra baik institusi pendidikan. Padahal, mereka berhak untuk mendapatkan pendidikan yang “mencerdaskan” bukan “mengerdikan”.

Seharusnya, para siswa mendapat kesempatan untuk membangun kemanusiaannya melalui pendidikan. Melalui pendidikan, para siswa diajak untuk mendefinisikan serta merekonstruksi kesadarannya sebagai manusia di antara

masyarakat dan konteks situasi yang terus berkembang. Hal tersebut ditegaskan oleh Paulo Freire bahwa pendidikan yang memanusiakan mengungkapkan kesadaran para murid sendiri.

Ketika proses pemanusiaan itu direnggut dari pengalaman belajar para siswa, hal yang terjadi hanyalah dominasi kepentingan yang tidak lagi murni untuk pendidikan. Bahkan, yang sangat jelas terjadi dalam pendidikan kita, adanya proses penyeragaman. Padahal proses penyeragaman tersebut sudah dikritik secara eksplisit oleh Anis Baswedan dengan mengatakan pendekatan lama, mendidik anak-anak secara seragam tidak bisa dilakukan lagi (Majalah Tempo, 25 April - 1 Mei 2016).

Institusi formal pendidikan seperti sekolah serta dinas pendidikan dan agen-agen pendidikan seperti guru perlu sadar dan secara tegas menanamkan esensi pendidikan. Yang paling utama dari pendidikan adalah mengantarkan siswa menuju pemahaman kemanusiaan secara utuh dalam segala bidang. Sekaligus, praktik pendidikan tak boleh bertendensi politis maupun ekonomis, walaupun banyak sekali tekanan dari pihak lain. Senada dengan pandangan George S. Counts, kalau pendidikan tidak berusaha mempromosikan pemahaman manusia tentang dunia sepenuhnya dan seterusnya, program manapun tak layak menyandang gelar sebagai “pendidikan”.

KAMI, ORMAS, DAN POLISI

BENEDIKTUS FATUBUN

Pukul 09.30 WIB (15/07) saya bersama Fileksius Gulo menuju Asrama Mahasiswa Papua Kamasan I di Jl. Kusumanegara, Yogyakarta. Tujuan kedatangan kami adalah meliput aksi Mahasiswa Papua, yang telah diadakan dari Rabu dan diakhiri pada Jumat (15/07). Aksi itu merupakan rangkaian kegiatan Persatuan Rakyat untuk Pembebasan Papua Barat atau United Liberation Movement For West Papua (ULMWP). Aksi itu dilakukan bertepatan dengan 47 tahun pelaksanaan penentuan pendapat rakyat atau pepera yang jatuh pada tanggal 14 Juli 2016.

Sekitar pukul 10.30 WIB, kami tiba di lokasi. Kami tidak dapat melanjutkan perjalanan hingga ke depan asrama Papua karena dihadang oleh pihak



Reporter **natas** saat meliput peristiwa di Asrama Mahasiswa Papua Kamasan Jumat (15/7).

FOTO: FILEKS

kepolisian. Pihak kepolisian yang bergabung dengan Brimob menggunakan peralatan lengkap. Mulai dari tameng, gas air mata, rotan, dan senjata api. Melihat suasana tersebut, kami menduga suasana di sini begitu gawat dan sangat berbahaya. Penjagaan yang dilakukan di barat Asrama Mahasiswa Papua, kurang lebih 100 meter dari gerbang asrama, begitu ketat.

Sekitar pukul 10.35 WIB, para polisi yang awalnya berjaga di tempat itu berlari cepat sambil membawa semua perlengkapan mereka. Melihat itu kami pun berlari sambil mengeluarkan kamera dan kartu pers. Dari kejauhan, kami melihat seorang Mahasiswa Papua dikepung sejumlah polisi dan beberapa orang berpakaian preman. Kami semakin mempercepat langkah kami.

Merasa langkah kami begitu lambat, kami memutuskan untuk berlari menuju keramaian yang terjadi di Timur Asrama Mahasiswa Papua. Ketika kami sampai di tempat kejadian, kedua mahasiswa telah dimasukkan ke dalam mobil polisi. Untuk mengetahui apa yang terjadi kami bertanya kepada salah satu warga yang berada di sekitar tempat tersebut.

“Orang Papua dipukul oleh polisi,” tutur salah seorang warga. Tidak lama setelah kami sampai ke tempat kejadian, kedua mahasiswa itu telah dibawa pergi oleh pihak kepolisian.

Sekitar pukul 10.40 WIB, di sebelah Timur asrama Papua tepatnya, salah seorang Mahasiswa Papua digiring

Brimob dan beberapa orang berpakaian preman dengan tangan terikat di belakang. Tepatnya di seberang jalan yang berhadapan dengan kampus dua UST, mahasiswa itu disuruh duduk di aspal yang panas.

“Kamu *ngapain* di belakang asrama, kamu *ngapain* di Jogja, kamu kuliah di mana, kamu tinggal di mana,” buru beberapa Brimob yang mengelilingi dia serta menunjuk-nunjuk wajahnya.

Di sela-sela makian dan umpatan, ormas mulai melempari Asrama Mahasiswa Papua dengan batu. Polisi hanya menonton.

“Saya mau ambil serei (salah satu bumbu dapur),” tutur mahasiswa itu dengan nada pelan serta wajah tertunduk menghadap aspal. Setelah diinterogasi, mahasiswa itu langsung digiring oleh dua lelaki berpakaian preman menuju sebuah mobil polisi yang terparkir di sebelah Timur lampu merah yang berdekatan dengan kampus dua UST.

Tak lama kemudian rombongan Ormas Pemuda Pancasila sampai di tempat kejadian sekitar pukul 10.45 WIB. Rombongan yang menggunakan seragam serba oranye itu dengan cepat membuat suasana semakin tegang. Mereka datang menggunakan beberapa mobil dan motor yang diikuti dengan teriakan “Indonesia Merdeka!”.

Lampu merah di sebelah Timur Kampus II UST, menjadi tempat Pemuda Pancasila dan

beberapa rombongan ormas lainnya melakukan orasi. Beberapa spanduk bertuliskan “NKRI HARGA MATI”, dibawa oleh Pemuda Pancasila serta dibentangkan pada saat orasi.

Orasi dimulai dengan menyanyikan beberapa lagu nasional. Setelah menyanyikan lagu nasional, salah seorang ormas dari Pemuda Pancasila maju dan mulai membuka orasinya, “saudara-saudara kita dari Papua, jangan sampai

emas memecah belah kita.” Sekitar pukul 10.55 WIB, dalam teriakan-teriakan ormas, terselip umpatan seorang pria yang sedang memimpin orasi, “*ora pake klambi, wong ireng.*” Pria itu bertutur dengan wajah tersenyum.

Kurang lebih pukul 11.00 WIB, lima puluh meter ke arah Timur tempat orasi para ormas, terparkir sebuah truk pengangkut milik kepolisian. Tidak jauh dari tempat terparkirnya truk, nampak beberapa Mahasiswa Papua yang sedang digiring oleh sebagian polisi berpakaian lengkap. Kami berlari secepat mungkin menuju truk guna mendapatkan gambar sekaligus informasi tentang mengapa mahasiswa itu ditangkap. Namun ketika kami tiba di tempat, mereka telah dimasukkan ke dalam truk polisi dan dikawal oleh para polisi berpakaian

lengkap.

Sekitar pukul 11.10 WIB, kami diinterogasi oleh pihak kepolisian. “Dari lembaga mana? *Ngapain* kamu di sini? Keperluan kamu apa?” tutur AKP J. Rijal, nama salah satu polisi yang menginterogasi kami. Setelah mendengar pertanyaan tersebut, saya pun menjawab, “kami dari Pers Mahasiswa Universitas Sanata Dharma”.

Merasa belum puas, dia pun menanyakan KTP dan KTM. Setelah beberapa lama, barulah kami menyadari bahwa kami telah dikelilingi oleh begitu banyak orang. Mulai dari ormas, wartawan dan para intel yang berpakaian preman. Setelah itu, AKP J. Rijal memerintahkan seorang intel untuk mengambil gambar kartu pers beserta KTP dan KTM kami. “Mana intel, mana Intel. Foto kartu pers, KTP, dan KTM mereka,” tuturnya sambil memegang *Id card* kami untuk di foto. Setelah mengambil gambar, kami pun dipersilahkan pergi.

Sekitar pukul 11.15 WIB, ormas-ormas yang tergabung dari Pemuda Pancasila, Generasi Muda FKPP (Forum Putra-Putri Purnawirawan TNI/Polri Indonesia) dan Paksi Katon berjalan menuju Asrama Mahasiswa Papua sambil membentangkan spanduk bertuliskan “NKRI HARGA MATI” serta menyanyikan lagu-lagu kebangsaan.

Kira-kira pukul 11.20 WIB, polisi berusaha membuka gerbang Asrama Mahasiswa Papua. Sehingga terjadi aksi saling dorong antara pihak kepolisian dan Mahasiswa Papua yang

berada di dalam asrama. Melihat hal tersebut, kami langsung berlari menghampiri gerbang Mahasiswa Papua. Ketika saya berlari sendirian (teman saya sudah menghilang di dalam keramaian) menghampiri gerbang Asrama Mahasiswa Papua, saya dikejar seorang pria berpakaian serba hitam dan berbadan gempal.

Ketika saya hendak mengambil gambar, jaket saya dipegang dan ditarik. Orang itu lalu bertanya dengan nada kasar “Siapa kamu? Buat apa di sini? Dari lembaga mana kamu?” tegasnya. Saya pun menjawab, saya adalah Pers Mahasiswa, sambil menunjukkan kartu pers saya.

Merasa tidak puas dengan jawaban saya, dia pun menarik kartu pers yang tergantung di leher saya. Setelah menarik dan melihat kartu pers saya, dia bertanya lagi, “ada surat izin, *nggak*?”.

“Memangnya harus ada surat izin? Ini kan keterbukan informasi, masyarakat perlu tahu,” ucap saya.

“Tahu apa kamu!” pungkasnya sambil mendorong badan saya ke arah jalan raya. Peristiwa tersebut terjadi di depan Hotel Fave yang bersebelahan dengan Asrama Mahasiswa Papua.

Mendapat perlakuan demikian, saya memutuskan untuk menjauh dari gerbang Asrama Mahasiswa Papua. Hal itu saya lakukan mengingat makin banyaknya pihak kepolisian dan para ormas yang mengatasnamakan dirinya Laskar Jogja memenuhi gerbang depan Asrama Mahasiswa

Papua. Laskar Jogja datang dengan sejumlah alat tajam yang tergegam di tangan mereka.

Kira-kira pukul 12.15 WIB, beberapa Mahasiswa Papua berbadan gempal sedang duduk di depan teras Asrama Mahasiswa Papua, sambil mengisap beberapa batang rokok. Keempat ormas dan sejumlah polisi telah berada tepat di depan gerbang Mahasiswa Papua.

Suasana yang awalnya sepi, tiba-tiba menjadi ramai oleh ucapan dan makian para ormas yang ditujukan kepada Mahasiswa Papua. “Hei Papua, asu. Bangsat kau, Papua. Babi kau. Papua asu! Papua monyet! Bakar-bakar! Bunuh. Bunuh. Indonesia!” ucap para ormas yang tiba-tiba menggila di depan Asrama Mahasiswa Papua. Di sela-sela makian dan umpatan, ormas mulai melempari Asrama Mahasiswa Papua dengan batu. Polisi yang berada di tempat kejadian hanya diam dan menonton.

Sekitar jam 13.00 WIB, suasana di Asrama Papua sudah mulai mereda, akan tetapi personil kepolisian makin banyak berdatangan di sekitaran asrama. Kami memutuskan untuk kembali ke kampus sambil menunggu perkembangan selanjutnya. Sepanjang perjalanan menuju motor kami yang terparkir kurang lebih seratus meter di Barat Asrama Mahasiswa Papua, saya melihat kurang lebih enam truk pengangkut polisi terparkir berjejer di sepanjang jalan menuju Asrama Papua. Dalam hati saya bertanya, “begitu bahaya kah mereka?”

HUMANISME DRIYARKARA DAN PEMBEBASAN FREIRE

BENEDIKTUS FATUBUN

Driyarkara, dalam pemikirannya menuturkan bahwa, sebuah pendidikan dapat terjadi diakibatkan oleh kemauan manusia untuk hidup bersama-sama. Sebab dengan hidup bersama-sama kita akan melakukan sebuah tindakan yang secara sadar maupun tidak sadar memasukkan manusia muda ke dalam alam manusia, dengan kata lain menjadikan manusia yang sesungguhnya. Pendidikan adalah maksud dan pengaruh dari si pendidik atau orang yang mengajarkan (Anton Haryono, Dkk, 2013:270). Jadi pendidik yang dimaksud di sini, bukan hanya seorang guru, dosen atau mereka yang bergelut dalam dunia pendidikan

atau pengajaran, melainkan semua orang yang ada dan beraktifitas di sekitar kita. Dari proses pemanusiaan atau pengajaran tersebut seorang manusia muda yang diberikan sebuah pengajaran jelasnya akan menemui sebuah hal yang kontradiksi, entah itu positif ataupun negatif, tergantung cara sang pendidik mendidik dan cara manusia mudah tersebut menyikapi.

Berkaitan dengan humanisasi, Paulo Freire mengatakan bahwa pemanusiaan maupun dehumanisasi merupakan kemungkinan-kemungkinan bagi manusia sebagai makhluk yang belum utuh, yang sadar akan ketidaktahuan dirinya. Meskipun humanisasi dan dehumanisasi merupakan alternatif, hanya

pemanusiaan yang menjadi fitrah manusia. Fitrah pemanusiaan ini selalu diinjak-injak, namun selalu dihalalkan. Ia dikerdilkan oleh ketidakadilan, eksploitasi, penindasan dan kekerasan yang dilakukan oleh kaum penindas. Akan tetapi, ia (kehumanisan) diteguhkan kembali melalui dambaan kaum tertindas akan kebebasan dan keadilan, serta dikuatkan kembali oleh perjuangan kaum tertindas itu untuk memulihkan kembali kemanusiaan mereka yang telah hilang (Paulo Freire, dkk, 2003:435). Untuk hal tersebut, Driyarkara selalu berseru agar seorang pendidik haruslah dapat memanusiakan manusia yang adalah kaum didiknya. Kaum didik tersebut haruslah mampu dan mau memanusiakan



dirinya sendiri sebab melalui pendidikanlah perubahan tercipta.

Hominisasi dan Humanisasi

Jika Paulo Freire mengatakan bahwa, pemanusiaan (humanisme) yang di rebut dengan usaha yang serius dari kaum tertindas, merupakan sebuah upaya untuk keluar dari era dehumanisasi, pastinya mereka melalui tahap hominisasi dan humanisasi. Tahap di mana mereka menjadi lebih dari manusia yang sekedar hidup. Berkenaan dengan pernyataan di atas, Thomas Hobbes yang merupakan filsuf Inggris dalam karyanya yang berjudul *Leviathan*, mengatakan bahwa *homo homini lupus* merupakan sifat asli dari manusia. Untuk hal demikianlah, manusia perlu mengangkat dirinya ke taraf manusia, mengalahkan

dorongan-dorongan kodrati untuk saling “menelan”. Atas dasar itu, maka lahirlah masyarakat. Atas dasar itu pula manusia bisa hidup bersama-sama sebagai manusia. Berkaca dari pandangan Hobbes tersebut, Driyarkara pun memiliki pandangan yang sejalan dengan konsep Hobbes tentang pengangkatan diri ke taraf manusia, akan tetapi, Driyarkara mengkritik bahwa, pengangkatan diri ke taraf manusia bukan hanya mengalahkan nafsu-nafsu atau dorongan-dorongan kodrati seperti yang dikatakan Hobbes, melainkan yang harus diangkat ialah seluruh manusia. Driyarkara memandang manusia sebagai makhluk yang aneh. Dia harus mengangkat dirinya untuk hidup dan berada sesuai dengan kodratnya. Kerbau tidak bisa tidak “mengkerbau”. Kalau manusia, tidak memanusiakan, maka dia “mengkerbau”. Jadi,

manusia harus memanusiakan dirinya. Inilah yang disebut proses hominisasi dan humanisasi. Tingkat minimal dalam sebuah kehidupan manusia (*hominisasi*), sedangkan tingkat yang lebih sempurna adalah humanisasi. Tetapi, tidak ada batasan antara keduanya, karena pada hakekatnya tidak ada hominisasi tanpa humanisasi.

Seperti yang dipaparkan di atas, tujuan dari pemanusiaan manusia adalah hominisasi dan humanisasi. Manusia tidak hanya harus menjadi homo (manusia), dia juga harus menjadi homo yang human, artinya berkebudayaan tinggi. Gambaran tersebut yang seharusnya dimiliki oleh setiap pendidik, baik melalui perbuatan dan tingkah lakunya (sikap). Sehingga tidak mengherankan, jika pendidikan atau mendidik kita sebut sebagai tindakan fundamental atau yang



Guruh Ramdani
 “Menyongsong Hari Esok”
 130 x 68 cm, 1997
 Cat Minyak di Kanvas

mengubah, menentukan, dan mengkontruksi hidup manusia (Driyarkara tentang pendidikan, 1980:80-83). Jadi dengan kata lain, jika manusia tidak dapat memanusiakan manusia (dirinya dan orang lain), maka dia menjadikan manusia kerbau (binatang).

Manusia yang tergambar di sini merupakan manusia dalam konteks yang telah mempunyai kebudayaan tinggi, yang telah menjadi manusia yang sesungguhnya (perlu di ingat menjadi manusia yang sesungguhnya bukan dipandang dari kecerdasannya, bukan juga berarti pernyataan tersebut mengindikasikan bahwa kita tidak perlu cerdas sebagai pendidik, cerdas itu penting, akan tetapi moral dan tingkah

laku sebagai manusialah yang kita soroti). Mengapa dikatakan demikian? Sebab manusia yang dimaksud adalah mereka yang telah melalui proses *hominisasi* dan humanisasi, manusia yang dimaksud adalah mereka para pendidik (yang dimaksud pendidik adalah semua orang yang hidup di sekitaran kita, yang mau berkomunikasi bersama kita). Akan tetapi, yang perlu di ingat adalah, pendidik yang ada di sekitar kita, dapat digolongkan menjadi dua, pendidik yang benar-benar manusia, dan pendidik yang secara fisik manusia dan moralnya belum lah humanis. Pendidik seperti itu merupakan manusia yang hanya hidup, tidak ada bedanya dengan babi hutan yang juga hidup (maaf). Sekedar hidup.

Akan tetapi, pendidik yang akan di sorot secara lebih mendalam adalah pendidik dalam lingkup akademik.

Mengapa yang patut disoroti adalah pendidik dalam lingkup akademik? Sebab bertolak dari berbagai polemik yang timbul pada dunia pendidikan dewasa ini, ketika para pendidik telah keluar dari fitrahnya sebagai seorang pendidik. Pendidik dewasa ini lebih melihat jabatan yang disandang sebagai sebuah investasi yang perlu di kembangkan dengan berbagai cara. Salah satu contoh kecilnya dapat kita lihat melalui pemanfaatan yang di lakukan oleh sebagian pendidik, terkait kebijakan pemerintah dalam mengeluarkan sertifikasi guru. Kebijakan yang

dikeluarkan oleh pemerintah bertujuan untuk membenahi kualitas para pendidik kita dan mengajak agar para pendidik kita semakin giat mengajar, namun melalui kebijakan tersebut, para pendidik justru berlomba-lomba mendapatkan gelar sertifikasi tersebut dan cenderung mengesampingkan kewajibannya sebagai seseorang yang seharusnya memanusiasi peserta didiknya. Pendidikan dan pendidik yang disebut sebagai tindakan fundamental atau yang mengubah kaum didiknya menjadi manusia yang bukan hanya sekedar hidup, melainkan manusia yang mempunyai rasa untuk memanusiasi manusia lain menjadi hilang.

Bertolak dari pernyataan bahwa pendidik harus memanusiasi manusia (peserta didik), Ki Hadjar Dewantara dengan semboyannya yang terkenal, sekaligus sebagai semboyan yang menunjukkan kekhasan Indonesia mengatakan bahwa seorang pendidik haruslah memiliki tiga hal yang nantinya membentuk manusia yang dapat memanusiasi manusia kelak, pertama, *Ing Ngarsa Sung Tuladha*, artinya seorang pendidik selalu berada di depan untuk memberi teladan. Ia adalah pendidik yang memberi contoh dalam perkataan dan perbuatannya, sehingga pantas diteladani oleh para muridnya. *Ing Madya Mangun Karsa*, artinya seorang pendidik selalu ada di tengah-tengah muridnya, untuk selalu memberi motivasi kepada para muridnya untuk berkarya dan menumbuhkan ide-idenya. *Tut Wuri Handayani*

artinya, seorang pendidik selalu mendukung dan menopang (mendorong) para muridnya untuk berkarya (Bartolomeus, 2013:78).

Menilik dari pernyataan Driyarkara, Paulo Freire dan semboyan Ki Hadjar Dewantara yang telah di paparkan di atas, kita dapat mengetahui betapa pentingnya peran pendidik dalam dunia pendidikan. Akan tetapi, jika kita melihat pada era sekarang, fungsi pendidik sebagai seseorang yang dipandang sebagai subjek yang telah mempunyai kebudayaan yang tinggi, terkadang sikap dan tindakannya tidak mencerminkan hal tersebut. Fitrahnya sebagai seorang pendidik hilang, dikalahkan oleh rasa kesombongan dan keangkuhan, yang disokong oleh banyaknya titel yang telah diperoleh. Sehingga pantaslah apa yang dikatakan Soe Hok Gie, dosen atau guru bukan dewa, dan murid atau mahasiswa bukan kerbau. Dosen atau guru yang tak tahan dikritik boleh masuk keranjang sampah. Dengan banyaknya gelar yang diperoleh dan jabatan yang disandang, seorang pendidik pada era sekarang telah keluar dari fitrahnya sebagai pendidik yang harusnya memanusiasi manusia dan berpegang pada tiga semboyan Ki Hadjar Dewantara. Sehingga pendidikan yang merupakan alat untuk menjadikan manusia humanis, justru menjadikan manusia menjadi dehumanis. Pendidikan tidak lagi dipandang sebagai tindakan fundamental untuk mengubah suatu kehidupan masyarakat, tetapi dipandang

sebagai ladang berbisnis.

Berkaitan dengan pernyataan di atas, Freire menolak adanya pendidikan *banking concept*. Pendidikan tersebut merupakan ajang monopoli guru terhadap siswa di kelas. Jadi dapat dikatakan, siswa hanya boleh mengiyakan pernyataan pendidik, tanpa harus mengkritik atau memberikan pernyataan yang berlawanan. Hal tersebut dapat dimaklumi, mengingat gaya pendidikan konvensional yang selalu menganggap pendidik telah mengetahui segalanya. Namun pada hakekatnya, seperti dikatakan Soe Hok Gie, guru atau dosen bukan dewa, yang jelasnya mempunyai kekurangan dan kesalahan. Melihat pemasalahan tersebut, Freire ingin memecahkan kontradiksi yang terjadi tersebut, di mana guru dan murid seharusnya menjadi mitra dialog dalam memecahkan segala persoalan. Bukannya membuat jarak antara pendidik dan yang dididik, sebab dengan membuat jarak tersebut, indikasi untuk penindasan terhadap siswa akan terbuka secara luas. Oleh sebab itu, menurut Freire satu-satunya alat paling efektif dalam sebuah pendidikan pemanusiaan adalah adanya hubungan timbal balik permanen berbentuk dialog. Sekarang nampak jelas, bahwa dialog sangat dibutuhkan untuk membentuk manusia yang humanis. Jadi dapat dikatakan, seorang pendidik yang menggunakan posisinya sebagai upaya untuk menggertak siswanya dalam dinamika di kelas, dengan tujuan agar siswa tersebut tidak dapat mengajukan pertanyaan atau melontarkan

kritikan kepada sang pendidik tersebut, atau sering juga menggunakan nilai sebagai alat legitimasi untuk menjatuhkan siswanya, secara tidak langsung menggambarkan penindasan terhadap kaum didiknya (Firdaus, 2004:46).

Proses penyadaraan sebagai tujuan pendidikan

Ivan Illich, memandang bahwa sistem pendidikan formal menghasilkan sikap anti pendidikan pada masyarakat. Sekolah diakui sebagai satu-satunya lembaga yang menyelenggarakan bidang pendidikan. Begitu banyak orang yang gagal sekolah justru memperkuat argumen mereka sebagai bukti bahwa pendidikan merupakan tugas yang sangat mahal, sangat kompleks, selalu tertutup, dan kerap kali sangat sulit dilaksanakan (Saksono 2008:20). Sistem pendidikan seperti itu, sejatinya kontradiksi dengan pandangan Driyarkara sendiri, di mana pendidikan haruslah dapat memanusiakan manusia justru menjadi beban dalam kehidupan masyarakat sendiri. Mengapa bisa demikian? Beban tersebut pertama terlihat dari pandangan masyarakat umum yang menganggap, pendidikan hanya akan terjadi di dalam sekolah dan kedua adalah kesempatan untuk memperoleh ijazah sebagai prasyarat agar dihormati oleh orang lain menjadi pupus. Meminjam kata-kata Illich, sebagian besar manusia beranggapan, hak belajarnya dipersempit menjadi kewajiban bersekolah. Mengapa demikian? Melalui ijazah,

seseorang dapat dihormati dan dihargai. Hal tersebut tidak mengherankan, karena kebanyakan masyarakat hanya akan menghargai mereka yang berpendidikan (bersekolah), sedangkan mereka yang tidak memiliki kesempatan untuk mengecap dunia pendidikan jelasnya tidak dihargai.

Berkaitan dengan masalah tersebut, Illich berpendapat bahwa, baik pengetahuan maupun keadilan tidak bisa dikembangkan melalui sistem pendidikan formal, karena para pendidik bersikeras mengaitkan pengajaran dan ijazah. Pengetahuan dan kedudukan seseorang dalam masyarakat dicetak dalam sistem pendidikan formal. Illich beranggapan belajar berarti menuntut suatu keterampilan ataupun pemahaman yang baru, sedangkan kenaikan tingkat tergantung pada pandangan yang sudah dibentuk oleh orang lain. Memang benar, pengetahuan kerap kali merupakan hasil pengajaran, tetapi seleksi untuk mendapatkan sebuah pekerjaan tergantung tingkat pendidikan seseorang (Saksono, 2008:21).

Bercemin dari permasalahan yang telah dipaparkan secara luas pada lembar-lembar sebelumnya, Freire melalui prinsip metodenya berpendapat untuk dapat menuju ke kesadaran kritis dibutuhkan suatu perubahan kebudayaan. Hal tersebut hanya dapat terjadi melalui suatu proses penciptaan dan pengertian kebudayaan sebagai hasil ciptaan manusia. Oleh sebab itu, pendidikan seharusnya dijadikan arena pembebasan manusia yang

akan mengantar orang untuk menemukan dirinya sendiri, yang selanjutnya secara kritis dapat mengatasi realitas di sekitarnya dan secara kreatif mengubah dunianya (Saksono 2008:6).

Bagi Freire sendiri, hal yang diutamakan dalam pendidikan adalah manusia. Bahwa dialog antar manusia (pendidik dan peserta didik) merupakan jembatan untuk memerdekakan kaum didiknya. Pendidikan *banking concept*, merupakan sistem yang mengindikasikan dan mencerminkan masyarakat tertindas. Pendidikan demikian memiliki ciri-ciri, guru belajar, murid mengajar. Guru tahu segalanya-murid tidak tahu apa-apa, guru berpikir-murid dipikirkan, guru adalah subjek proses belajar-murid objeknya, dan masih banyak lagi. Freire menyebut pendidikan semacam itu menciptakan *nekrofil* (rasa cinta yang pada segala hal tetapi tanpa mempunyai makna) dan tidak melahirkan *biofil* (cinta pada segala hal yang mempunyai makna). Bagi Freire, sistem pendidikan seharusnya menjadi kekuatan dan pembebasan umat manusia. Bukan malah dijadikan alat untuk mempersulit peserta didik. Dewasa ini, sistem pendidikan telah menjadikan anak didik sebagai manusia-manusia yang terasing dan tercerabut dari realitas dirinya sendiri dan dunia sekitar, sebab ia telah mendidik mereka menjadi ada dalam artian seperti orang lain, bukan menjadi dirinya sendiri. (Saksono, 2008:8)

Demikianlah pandangan dari beberapa tokoh penggiat

pendidikan yang namanya tidak asing lagi. Permasalahan yang begitu kompleks dalam dunia pendidikan tentunya menjadi perhatian kita semua. Fitrah pendidik yang seharusnya memanusiakan manusia telah keluar dari alur yang seharusnya (jika tidak ingin dikatakan medehumanisasikan kaum didiknya). Sistem pendidikan yang terkadang disalahgunakan bagi mereka yang mengatasnamakan dirinya humanis serta mental para pendidik dan semua masyarakat (termasuk peserta

didik) yang perlu diubah untuk sebuah perubahan yang baik. Mencontoh dari Eropa, mereka telah melakukan revolusi mental-budaya yang menghasilkan masyarakat yang modern seperti dewasa ini. Walaupun perubahan yang dilakukan merupakan sesuatu hal yang sangat bertentangan dengan kehidupan masyarakat Eropa pada abad pertengahan ketika segala tindakan dan perbuatan didasarkan pada ajaran Gereja. Tetapi pada abad pencerahan, masyarakat Eropa sadar bahwa jika mereka ingin maju, mereka

harus merubah mental dan budayanya, sehingga konsep theosentris diubah menjadi antroposentris, segala sesuatu yang bersifat dogmatis menjadi sesuatu yang rasional. Hal demikian yang menjadikan Bangsa Eropa menjadi bangsa modern seperti sekarang ini. Seyogyanya, suatu bangsa akan mampu berkembang, ketika mental masyarakatnya telah dibenahi dan mau dibenahi.

Referensi:

Driyarkara. *Driyarkara Tentang Pendidikan*,
Yogyakarta: Penerbit Kanisius. 1986.

Freire, Paulo, Illich Ivan, Dkk. *Menggugat Pendidikan (Fundamentalis, konservatif, Liberal, Anarkis)*,
Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2003.

Freire, Paulo. *Pedagogi Pengharapan*,
Yogyakarta: Penerbit Kanisius. 2001.

Freire, Paulo. *Politik Pendidikan (Kebudayaan, Kekuasaan, dan pembebasan)*,
Yogyakarta: READ (Research, Education dan Dialogue), Pustaka Pelajar. 1991.

Freire, Paulo. *Pendidikan Kaum Tertindas*,
Jakarta: LP3ES. 1985.

Gatut, Saksono Ign. *Pendidikan Yang Memerdekakan Siswa*,
Yogyakarta: Rumah Belajar Yabinkas. 2008.

Haryono, Anton, Dkk. *Membaca Ulang Pemikiran Driyarkara*,
Yogyakarta: Universitas Sanata Dharma. 2013.

Sudiarja, A. SJ, Dkk. *Karya Lengkap Driyarkara*,
Jakarta, Yogyakarta, Semarang: PT Kompas Media Nusantara, PT Gramedia Pustaka Utama,
Percetakan Kanisius, Ordo Serikat Yesus Provinsi Indonesia. 2006.

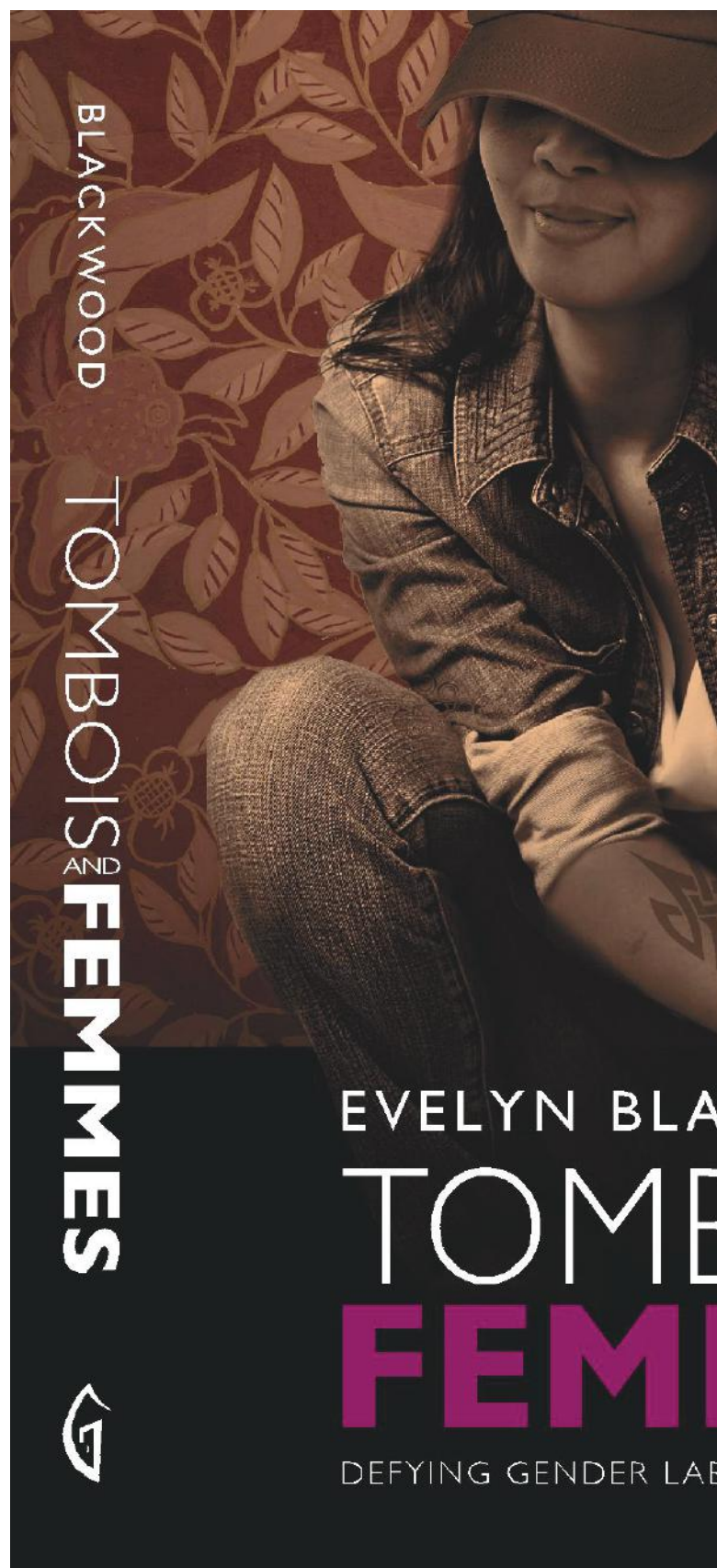
Samho, Bartolomeus. *Visi Pendidikan Ki Hadjar Dewantara (Tantangan dan Relevansi)*,
Yogyakarta: Penerbit Kanisius. 2013.

Yunus .M, Firdaus. *Pendidikan Berbasis Realitas Sosial (Paulo Freire dan Y.B Mangun Wijaya)*,
Yogyakarta: Logung Pustaka. 2004.

KINI MENGENAL PASANGAN LESBIAN INDONESIA

ISTU SEPTANIA

“Lebih baik aku yang patah hati. Sudah cukup dia tahu aku sayang padanya,” cerita Dedi, seorang tombois, kepada Evelyn Blackwood, seorang antropolog asal Amerika Serikat yang sedang melakukan riset tentang pasangan lesbian di Padang. Tia adalah mantan kekasih Dedi, dan ibunya meminta Dedi mencarikan suami untuk Tia. “Dalam hati aku berpikir, siapa yang akan setuju kekasihnya menikah? Tapi di kepalaku aku tahu aku tidak bisa menikahnya.”





<https://sgrcu.files.wordpress.com/2015/12/lontar-pub-tomboifemmes.jpg>

Dalam buku *Tombois and Femmes: Defying Gender Label in Indonesia*, Evelyn Blackwood memaparkan hasil risetnya pada tahun 2001 dan 2004 tentang pasangan lesbian di Padang.

Blackwood mengkaji sejauh mana kultur lokal dan norma *gender* serta pandangan subjektif tiap individu mempengaruhi kehidupan lesbian di sana. Untuk sumber data utama buku ini, dia bertemu dan mewawancarai 28 individu: 13 *tomboi* dan 15 perempuan yang berhubungan dengan *tomboi*. *Tomboi* adalah perempuan lesbian maskulin, sedangkan perempuan yang berhubungan dengan *tomboi* disebut *femme*.

Pengaruh pemahaman lokal

Kultur lokal sangat mempengaruhi pemahaman para pasangan lesbian Padang terhadap identitas mereka. Terdapat batasan kuat antara menjadi laki-laki dan perempuan dalam hubungan mereka. *Femme* bertindak sebagai perempuan yang berpenampilan dan berperilaku feminin, sedangkan *tomboi* berusaha mencapai sifat-sifat maskulin dalam keseharian mereka.

Ada yang menarik dari pasangan lesbian Padang yang ditemui Blackwood. Bagi *femme*, menjadi lesbian berarti menjalin hubungan dengan seorang *tomboi*. Saat Epi, seorang *femme*, ditanya apakah dia akan mencari pasangan *tomboi* lainnya jika putus dari pasangannya Danny, dia menjawab: “Kalau Danny mengakhiri hubungan kami, aku akan kembali menjadi perempuan biasa. Itu kodratku.”

Lesbian, untuk *femme*, adalah subjektivitas kondisional, dan bukan identifikasi atau orientasi seksual permanen. Suatu waktu mereka adalah lesbian perempuan, tapi kemudian bisa menjadi perempuan biasa lagi. Apa yang menurut mereka tetap adalah bahwa mereka perempuan biasa yang tertarik pada laki-laki. Mereka kebetulan sedang suka dan menjalin hubungan dengan seorang *tomboi*. Banyak *femme* akhirnya menikah dengan laki-laki agar memiliki keturunan.

Di sisi lain, *tomboi* merasa, terlepas dari jasmani perempuan mereka, bahwa mereka adalah laki-laki yang tertarik pada perempuan. Tidak seperti *femme*, *tomboi* tetap menjadi *tomboi*. Selain itu, kebanyakan *tomboi* memiliki hubungan dekat dengan keluarga mereka. Walaupun berperilaku maskulin di luar, mereka menjadi perempuan di rumah. Mereka membersihkan rumah, mencuci piring, dan menyapu. *Tomboi* berusaha menjalin hubungan baik dengan keluarga, terutama dengan ibu mereka.

Sekalipun ada tekanan untuk menikahi laki-laki, *tomboi* tetap

*Tombois and Femmes: Defying
Gender Labels in Indonesia*

Pengarang: Evelyn Blackwood
Penerbit: The Lontar Foundation

Rilis: 2011

Tebal: 251 halaman

berusaha patuh dan setia terhadap keluarga mereka. “Untuk keluarga, tidak ada yang namanya mantan keluarga, adanya mantan kekasih,” ujar Dedi menjelaskan kenapa keluarga tetap segalanya baginya.

Jurnal dengan bahasa apik

Tombois and Femmes: Defying Gender Label in Indonesia cocok bagi mereka yang hendak mempelajari lesbian, gay, biseksual, dan transgender (LGBT) untuk studi akademis. Walaupun menggunakan bahasa ragam ilmiah dan banyak teori *gender*—beberapa bab di buku ini berasal jurnal ilmiah karangan Blackwood sendiri—buku ini tetap mudah dimengerti bagi orang awam yang ingin belajar tentang *gender* dan kelompok minoritas seksual.

Sayangnya, buku terbitan Lontar ini hanya tersedia dalam bahasa Inggris sehingga kurang bisa diakses oleh kalangan luas di Indonesia sendiri. Hingga resensi ini dibuat, belum ada edisi terjemahan bahasa Indonesia.

Sejak Amerika Serikat merayakan pelegalan pernikahan untuk pasangan sejenis tahun lalu, euforia untuk kebebasan pasangan sejenis mulai meledak di berbagai belahan dunia, salah satunya di Indonesia. Indonesia memang masih jauh dari pernikahan legal bagi kaum LGBT. Namun, langkah awal untuk mengakui keberadaan kaum minoritas ini bisa dilakukan dengan lebih mengenal mereka, melihat bagaimana mereka masih hidup secara tertutup dan sembunyi-

sembunyi.

Buku yang terbit pada tahun 2011 ini memberikan cuplikan kondisi kaum minoritas seksual di Indonesia yang memiliki ragam suku dan budaya. Blackwood tidak memberikan penjelasan sederhana atau menempatkan kisah mereka secara kaku, melainkan menceritakan kisah-kisah personal tersebut secara terperinci dan sebagian agak provokatif sebagai salah satu bentuk perjuangan kaum lesbian sebagai kelompok minoritas. Selain menggunakan data, Blackwood juga memperkuat buku ini dengan beragam teori *gender* dan *queer*.

Namun, buku ini memiliki kekurangan sebagai rujukan untuk mengetahui keadaan riil teraktual lesbian di Padang. Blackwood melakukan riset untuk buku ini lebih dari satu dekade yang lalu. Kota Padang, seperti kota-kota besar lainnya, juga mengalami perkembangan pada era globalisasi ini. Kemudahan mengakses informasi tentu berpengaruh pada kondisi sosial-budaya di sana sekarang.

Cerita lainnya

Kisah lain berasal dari “seorang asing”, yang bisa memperlihatkan perbedaan pemahaman lokal dan global mengenai *gender*. Gia baru saja bergabung dengan kelompok lesbian yang diwawancara oleh Blackwood. Dia memberikan warna lain.

Sejak SMP, Gia sudah mencari informasi tentang lesbian di internet dan buku. Lancar berbahasa Inggris, dia

dengan mudah mendapatkan pemahaman internasional tentang lesbian. Dia menyebut dirinya seorang *andro*, yang dalam pemahaman Gia adalah seorang lesbian di antara *tomboi* dan *femme*.

Penolakan Gia terhadap label tertentu membuat bingung lesbian lain. Para lesbian di Padang perlu tahu jika dia seorang *tomboi* atau *femme*. Dengan begitu mereka tahu cara yang tepat untuk berinteraksi. Jika *femme* terlalu dekat dengan *tomboi* lain, itu bisa membahayakan hubungan *femme* dengan pasangan *tomboi*-nya. “Karena aku berbeda, aku dituduh memecah belah kelompok,” cerita Gia. “Jadi aku menjaga jarak.”

Setelah penjelasan panjang dan penjabaran kisah-kisah lesbian secara mendalam, Blackwood berkesimpulan di bukunya bahwa *tomboi* dan *femme* yang dia temui di Padang menciptakan ruang bagi diri mereka sendiri. Yang membedakan mereka dari gerakan LGBT nasional maupun internasional di luar sana.



MIMPI YANG HARUS MERDEKA

TIUR ANGELINA*

Ketika warna kulit menjadi alasan kekerasan, alasan bahwa suaramu tak patut didengar, tetapi bagaimanapun perbedaan diciptakan agar ada keragaman bukan penyeragaman. Nasib rakyat kulit hitam dinomorduakan, tidak diacuhkan dan berhak atas setiap kekerasan yang terjadi. Film ini

menceritakan sejarah perjuangan orang kulit hitam di Amerika mendapatkan haknya agar dapat memilih pemimpin dalam pemilu. Film ini termasuk film dewasa karena adegan kekerasan beberapa kali ditampilkan untuk melihat pertentangan yang terjadi.

Seorang David Oyelowo, memainkan peran sebagai Martin Luther King, digambarkan sangat

memotivasi dan membakar semangat. Itu membuat banyak hati kecil para pendengar terutama orang kulit hitam untuk tidak pernah menyerah dengan apa yang telah nenek moyang mereka perjuangankan. Bertahun-tahun dari generasi ke generasi berikutnya belum pernah ada kata setara antara orang kulit hitam dan kulit putih. Itulah perjuangan yang sedang

dihadapi orang kulit hitam di Amerika Serikat bagian Selatan. Gerakan unjuk rasa ini dilakukan dengan beberapa pendeta kulit hitam yang berani menghadapi semua resiko yang akan terjadi. Perjuangannya dari satu tempat ke tempat lain membuat dirinya selalu diancam bahaya, diancam penjara, diancam kekerasan dan tembakan langsung. Tetapi untuk 20.000 jiwa orang kulit hitam yang hidup di Amerika dirinya tak pernah gentar dengan teriakan takut dalam dirinya.

Kemudian seorang wanita Annie Lee Cooper yang diperankan oleh Oprah Winfrey yang harus bergelut fisik melawan Sherif Clark, dipukul, dan didorong hingga jatuh ketika membela seorang kakek yang tak dapat berlutut sebagai tanda hormat untuk Sherif. Keberaniannya patut diacungi jempol sebagai penentang saat itu. Mereka orang kulit hitam bersama-sama bergelut menentang ketidakadilan yang diterima mereka dari kalangan orang berkulit putih. Ada hak yang patut diperjuangkan. Hak untuk hidup setara, hak untuk memilih pemimpin mereka, hak untuk bersuara dan didengarkan. Setiap hari orang kulit hitam di Amerika bagian Selatan ini berharap agar penembakan terhadap anak-anak kulit hitam berhenti, berharap agar mereka bisa sekolah, berharap agar mereka layak dimanusiakan oleh sesamanya.

Orang kulit hitam sama sekali tidak bisa mengendalikan nasibnya lantaran orang kulit putih yang selalu mendiskriminasi setiap hak-hak

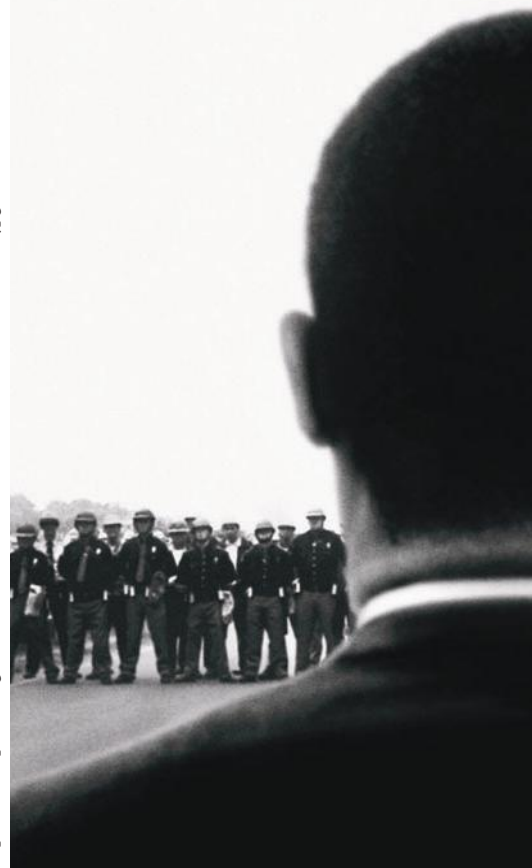
yang seharusnya sama. Aksi demo tanpa kekerasan dilakukan oleh orang kulit hitam dengan berjalan kaki dari satu tempat ke tempat yang lain. Memohon agar adanya kesamaan hak pada sheriff di Selma, mata orang kulit putih tak bisa lepas memandangi barisan orang kulit hitam yang memenuhi jalanan, diteriaki, di perlakukan kasar, itulah yang didapat orang kulit hitam. Dalam masa tahanannya dengan pendeta, Martin Luther mengatakan bahwa ia lelah, dan ingin masalah ini cepat selesai dan ia begitu khawatir pada nasib orangnya di generasi berikutnya, tetapi dari dukungan rekan pendetanya yang mengatakan bahwa “siapaakah diantara kamu yang karena kekawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya?” kemudian dari sanalah semangat Martin Luther hidup kembali.

Beberapa kali demo yang dilakukan selalu berakhir pada kekerasan fisik pada orang tua dan penembakan langsung. Lewat suara-suara kecil dan teriakan minta dibebaskan, rakyat Selma terutama orang kulit hitam mendapat posisinya kembali agar mereka juga mendapat hak yang sama dengan orang berkulit putih.

Kekerasan dan diskriminasi membuat Martin Luther dan orang kulit hitam semakin jengah dengan perilaku orang kulit putih. Saat Annie Lee Cooper di dorong jatuh oleh sherif Clark karena membela seorang kakek, dengan cepat mata kamera dari seorang jurnalis merekam kejadian tersebut hingga semua kalangan dapat

ONE D
CAN CHANGE

SEL



<http://i63.fastpic.ru/big/2015/0116/95/2d1f22c36d9fe3df8bbf5066af2e62e95.jpg>

DREAM
OF THE WORLD

MA



melihat perlawanan tersebut di televisi dan koran. Dengan sigap pula Martin Luther berpidato di depan kamera televisi untuk mengajak sukarelawan agar mau membantu keberhasilan demo atas kesetaraan hak ini. Para pendeta, kaum awam, dan siapapun yang tergugah hatinya datang ke Selma dan siap membela hak orang kulit hitam.

Dalam film ini penonton akan merasakan ketegangan pada setiap demo yang dibalas dengan kekerasan oleh perintah Sheriff Clark, tetapi pada bagian pidato oleh Martin Luther King akan ada perasaan semangat yang membakar untuk menyetarakan antara orang kulit putih dan kulit hitam. Paul Webb menceritakan kisah perjuangan ini dengan alur maju yang mudah dimengerti. Musik yang di tampilkan oleh Jason Moran begitu menarik dan pas dengan cerita yang sedang berjalan, pengaturan temponya begitu sesuai.

Martin Luther King sangat pandai dalam memberikan ucapan yang menyentuh ketika berpidato. Apa yang dikatakannya selalu dapat menyentuh hati banyak orang. Di depan monumen Abraham Lincoln ia berteriak dengan keras tanpa di buat-buat, tanpa teks, dan di dengarkan oleh ribuan barisan orang kulit hitam, para pendeta dan sukarelawan yang siap memartabatkan kulit hitam membawa bendera Amerika dan menyukseskan pidato Martin Luther yang menjadi kekuatan tersendiri bagi orang kulit hitam. Pidato ini terkenal dengan nama "I Have a Dream" dan cuplikan pidato singkatnya:

"Saya melihat sebuah tanah impian. Mungkin saya tidak bisa pergi ke sana bersama kalian. Tetapi, saya ingin malam ini kalian semua tahu, kita sebagai manusia akan pergi ke tempat impian yang kita inginkan. Saya sangat bahagia malam ini. Saya tidak merisaukan apapun, saya tidak takut pada siapapun. Mata saya telah melihat kejayaan Tuhan".

Ada semangat membakar di setiap pidato Martin Luther. Pidato yang dibawakan Martin Luther King ini ternyata masuk dalam kategori 10 pidato terbaik sepanjang masa. Pada tahun 2015, film Selma ini masuk juga dalam lima nominasi terbaik Oscar. Perjuangan Martin Luther King dan rekannya ini adalah sebuah simbol sejarah perjuangan hak-hak sipil dan antidiskriminasi di negeri Amerika bagian Selatan.

*Penulis adalah mahasiswi Program Studi Ilmu Sejarah 2014



Aksi solidaritas pers mahasiswa
menanggapi pembredelan LPM Lentara
UKSW Salatiga Jumat (23/10/15).

PERS MAHASISWA DI UJUNG TANDUK

BINTANG WAHYU*

Tidak mudah menjelaskan kondisi pers mahasiswa (persma) dewasa ini, selain karena perbedaan dinamika, tiap pers mahasiswa juga berbeda dalam memaknai kepersmaaan. Perbedaan pandangan inilah kemudian yang melatarbelakangi beragam dinamika yang muncul. Ada pers mahasiswa yang menjadi bulan-bulanan petinggi kampus karena berita yang disajikan, ada juga persma yang berkawan akrab dengan pejabat kampus karena pemberitaannya mendongkrak popularitas kampus. Namun, apapun bentuknya saat ini, pers mahasiswa dulunya lahir dari satu rahim yang sama, yakni rahim perlawanan terhadap ketidakadilan dan penindasan.

Berbarengan dengan berdirinya organisasi pemuda

Budi Utomo 1908, lahir sebuah pers mahasiswa bernama *Hindia Poetra*. Organisasi pers yang digawangi oleh para pemuda pribumi ini berdiri karena ketimpangan kebijakan yang dilakukan *Volksraad* (parlemen yang dibentuk pemerintahan Hindia Belanda). Kritik yang sering dilayangkan *Hindia Poetra* kala itu adalah hukum yang berjalan tajam kebawah tapi tumpul keatas. Sejurus kemudian, karena merasa membutuhkan sumbu perlawanan lebih banyak lahirlah pers mahasiswa *Jong Java* (1914), *Oesaha Pemoeda* (1932) dan *Soeara Indonesia* Moeda (1938) yang kemudian berperan dalam mewujudkan kemerdekaan Indonesia.

Pers mahasiswa, jika menggunakan definisi yang longgar, saat ini telah berusia satu abad lebih. Di umurnya

yang panjang ini persma telah memberikan corak tersendiri dalam perkembangan pers di Indonesia. Pers mahasiswa hadir menyajikan alternatif berita ketika media-media umum dibungkam di masa rezim Soeharto. Selama 32 tahun Orde Baru berkuasa, selama itu pula pers “dipasung”.

David T. Hill dalam bukunya yang berjudul *The Press in New Order* mencatat setidaknya ada lebih dari 10 media yang ditarik izin produksinya oleh Soeharto karena dianggap memperkeruh peristiwa 1965. Hill juga mengatakan sejak berhasil menduduki kursi presiden, Soeharto berupaya melumpuhkan media yang berseberangan dengan ideologinya. Ketika pers umum banyak dibungkam, pada saat itulah pers mahasiswa “naik daun”.

Masa emas pers mahasiswa

Di masa-masa sulit kebebasan pers, tidak hanya media *mainstream* saja yang dikekang, pers mahasiswa juga tidak luput dari upaya pembungkaman. Momen itu terjadi ketika peristiwa Malari 1974, di samping itu kebijakan NKK/BKK juga semakin mempersempit arah gerak pers mahasiswa karena “dikerangkeng” dalam kampus, kondisi ini juga yang membatasi mahasiswa untuk turun ke jalan. Namun, kondisi ini tidak membuat pers mahasiswa berkurang jumlah, justru jumlah pers mahasiswa semakin meningkat.

Berkat menjamurnya pers mahasiswa yang lahir dan semakin skeptis dalam menyikapi kebijakan pemerintah, pada dekade 90-an pers mahasiswa mampu menyajikan liputan-liputan kritis, mendalam, dan tajam yang kerap kali membuat panas telinga penguasa. Pers mahasiswa menyajikan liputan yang belum tentu berani dilakukan oleh pers umum kala itu karena risikonya adalah diberedel. Jadi mereka lebih memilih sikap sebagai corong pemerintah.

Kondisi seperti ini kemudian yang dimanfaatkan oleh pers mahasiswa Balairung UGM, mereka memilih bergerak di bawah tanah, mengelabui aparat bersenjata untuk mendongkel pemerintahan Orde Baru. Tema berita yang diangkat pun tidak jauh dari kritik terhadap Soeharto, upaya ini terus bertahan antara tahun 1997 sampai 1998.

Tidak hanya UGM, beberapa pers mahasiswa lain pun hingga menjadi target operasi militer karena dinilai pemberitaan yang disajikan merugikan pemerintah. Tahun 1995 pers mahasiswa Pijar mengulik tentang bisnis yang dilakukan TNI Angkatan Darat sehingga membuat tubuh TNI waktu itu goyah.

Majalah *Black Post* juga tak kalah kritis, berita berjudul “Subuh Berdarah di ISTN” sengaja dipilih sebagai wujud protes terhadap kesewenang-wenangan militer. Era 90an isu-

reformasi ini disambut dengan gegap gempita dan suka cita.

Ketika beralih dari era pers otoritarian ke reformasi, pers mahasiswa seperti kehilangan medan tempur. Jika di masa Orba musuh bisa dengan mudah dikenali, tapi tidak di zaman reformasi seperti ini, persma seperti hilang arah karena ketiadaan musuh bersama. Pers mahasiswa lalu kembali kedalam kampus meng-NKK/BKK-an diri sendiri.

Pers mahasiswa yang dulu vokal mengkritik pemerintah

Perhimpunan Pers Mahasiswa Indonesia mencatat, terdapat sebanyak 47 kasus yang menimpa pers mahasiswa dalam kurun waktu 2013-2016.

isu korupsi di tubuh pemerintah memang menjadi isu yang sering diangkat pers mahasiswa. Seperti yang dilakukan Suara Massa, berita yang mereka sajikan selalu bertepatan korupsi di tubuh pemerintah.

Simalakama reformasi

Setelah reformasi berjalan dan undang-undang kebebasan pers lahir, media yang dulunya sungkan kepada pemerintah berubah menjadi liar, kebebasan ini pula yang memantik media-media baru bermunculan. Kebebasan berekspresi ini juga ikut mendorong lahirnya ratusan partai politik karena kran demokrasi terbuka lebar. Kebebasan yang diberikan

kini tak lagi terdengar gaungnya, seolah reformasi telah merebut lapak mereka. Reformasi yang menjamin lahirnya banyak media umum memaksa pers mahasiswa kembali ke kampus karena tidak kuat bersaing dengan pers umum yang kuat secara modal dan kemampuan.

Tantangan ke depan

Kini reformasi sudah berusia 17 tahun, artinya kebebasan pers sudah memasuki usia remaja. Usia yang seharusnya sudah bisa menentukan mana baik dan buruk. Tidak hanya pers, kebebasan yang dilahirkan reformasi ini juga bisa dirasakan di berbagai sektor, salah satunya pendidikan. Kehidupan kampus

yang dulu mencekam karena mahasiswa diteror dan diancam Petrus (penembak misterius) jika berkumpul, kini sudah tidak ada lagi. Tapi apakah dengan tumbang rezim Soeharto membuat Orba ikut lenyap? Belum tentu.

Perhimpunan Pers Mahasiswa Indonesia (PPMI) mencatat, terdapat sebanyak 47 kasus yang menimpa pers mahasiswa dalam kurun waktu 2013-2016, kekerasan terbanyak dilakukan oleh pihak kampus tempat pers mahasiswa bernaung. Selain itu ada juga kekerasan yang dilakukan negara dan pihak lainnya. Kekerasan yang menimpa pers mahasiswa seringkali disebabkan karena tidak terima dengan pemberitaan. Terlebih pihak yang tidak terima tidak megedepankan Hak Jawab atau Hak Koreksi sebagaimana prosedur yang ada.

Apa yang menimpa pers mahasiswa Didaktika Universitas Negeri Jakarta (UNJ) sungguh memprihatinkan. Tahun 2013 lalu reporter Didaktika dilaporkan ke Polda Metro Jaya karena berita yang ditulisnya dianggap mencemarkan nama baik. Di samping itu, Didaktika juga menerima ancaman bahwa sekretariat organisasinya akan dibakar.

Tidak hanya itu, penarikan produk majalah dari edaran yang menimpa LPM Lentera Universitas Kristen Duta Wacana (UKSW) Salatiga oleh polisi juga ikut memperkeruh wajah kebebasan pers mahasiswa. Majalah Lentera yang mengangkat isu peristiwa 1965 dituduh membangkitkan



FOTO: IRA

kembali isu Komunisme. Pihak UKSW, tempat dimana Lentera bernaung, justru bersikap pro dengan polisi. Alih-alih membela mahasiswanya, pihak kampus justru menuduh Lentera melakukan kesalahan dan disuruh meminta maaf. Kasus ini juga berlanjut ke Meja Hijau.

Masih basah dalam ingatan apa yang menimpa pers mahasiswa Poros Universitas Ahmad Dahlan (UAD), buletin edisi Magang yang memberitakan pendirian Fakultas Kedokteran juga tak luput dari pembungkaman. Berkas berita itu Poros kemudian dibekukan oleh pihak rektorat dengan alasan tidak suka dengan isu yang diangkat.

Tentu masih banyak kasus lain terjadi yang tidak bisa disebutkan disini, minimal tiga kasus di atas sudah cukup sebagai bukti bahwa

pers mahasiswa saat ini “tidak sedang baik-baik saja”. Masifnya pembungkaman pers oleh petinggi kampus menandakan bahwa orde baru belum sepenuhnya mati, dia hidup dalam hati para birokrat yang haus kekuasaan dan anti terhadap kritik.

Keberadaan pers mahasiswa dalam kampus perlu terus dijaga, idealisme perlawanan terhadap ketidakadilan harus terus dipupuk. Niat yang mendasari lahirnya *Hindia Poetra* harus terus digaungkan. Di mana ada kekuasaan disitulah terdapat ketidakadilan, dan disanalah pers mahasiswa dibutuhkan.

*Penulis adalah Pemimpin Umum Pers Mahasiswa Poros Universitas Ahmad Dahlan



LAHIR: 20 Oktober 1963

PENDIDIKAN: S1 Jurusan Matematika FMIPA UGM | S2 Computer Science, Ateneo de Manila Graduate School of Business, Filipina | S3 Management Information Systems, Graduate School of Management, University Putra Malaysia

KARIER: Kepala BAPSI (1994-2000) | Dekan FMIPA USD (2000-2002) | Wakil Rektor I USD (2002-2005) | Kepala Pusat Kajian Teknologi Informasi (2006-2007) | Rektor USD (2014-2018)

FOTO: JEJE

REKTOR UNIVERSITAS SANATA DHARMA:

HUMANISME ITU SOAL KEPEKAAN NURANI

GEOVANNY REINITA

*Drs. Johanes Eka Priyatma, M.Sc, Ph.D. adalah rektor kedelapan yang menjabat di Universitas Sanata Dharma (USD). Dalam pembicaraannya dengan awak **natas** pada Jumat (27/5), beliau mengungkapkan pandangan dan pemikiran Driyarkara, nilai humanisme, visi dan misi USD serta akreditasi USD. Berikut percakapannya:*

Menurut Anda, apa pemikiran Driyarkara tentang pendidikan?

Kata kunci dari pemikiran Driyarkara adalah pendidikan itu proses humanisasi. Humanisasi artinya menjadikan manusia yang seutuh-utuhnya manusia. Manusia itu seharusnya bahagia dengan dirinya sendiri. Tetapi kebahagiaan itu hanya akan sampai sepenuh-penuhnya ketika dia berhenti memikirkan dirinya sendiri.

Apa realisasi dari pernyataan Anda tersebut soal humanisasi?

Analoginya seperti ini, “saya senang bantu, tetapi saya tidak berbuat apa-apa”. Mana mungkin, kan? Suatu saat saya mengundang beberapa pengurus lingkungan saya karena ada seorang anggota lingkungan ke rumah saya. Orang tersebut minta tolong karena sertifikat rumahnya mau disita. Lalu, saya kumpulkan semua pengurus

lingkungan. Saya berkata, “Bagaimana ini? Kalau kita tidak menolong, hentikan Doa Rosario dan pertemuan lingkungan. Tidak ada pilihan lain, kita harus menolong.” Menurut saya, tidak ada gunanya Doa Rosario dan pertemuan lingkungan karena ketika ada masalah seperti ini, mereka malah tidak mau menolong. Nah, seperti itulah proses humanisasi.

Apakah konsep pendidikan humanisme itu mengarah kepada kesadaran manusia akan pendidikan intelektual dan kepekaan sosialnya?

Berkembang, ya harus berkembang kepekaan hati nuraninya dan komitmen untuk membantu orang-orang yang sangat membutuhkan. Saya berjuang membuat taman dan menanam pohon di Kampus Paingan untuk memberikan wahana, sarana, dan tempat yang memungkinkan terjadinya

pertumbuhan kepekaan seni, budaya, estetika, dan kemanusiaan tersebut. Kita bisa berharap kepada mahasiswa yang mempunyai pengalaman baik di tempat yang nyaman, ideal, bersih akan memperjuangkan itu juga bagi kita karena gedung lingkungan itulah yang membentuk kita.

Apakah itu adalah wujud dari cerdas dan humanis, menurut Anda?

Iya. Kita tidak bisa mengonsepsi pendidikan di USD itu hanya menguasai ilmu, hanya cerdas saja. Saya merasa, bagaimana mungkin kita menghasilkan orang-orang yang cerdas kalau lingkungan keseluruhannya sendiri tidak cerdas? Oleh karena itu, kami berjuang *toh* untuk menciptakan lingkungan yang baik, fasilitas belajar yang nyaman, dan taman juga diberi lampu. Itu adalah wujud humanisme kita. Kalau

hidup di kampus yang tidak indah, bagaimana mungkin dia mempunyai kesempatan untuk tersentuh?

Dalam konteks humanisme, bagaimana cara Anda sebagai rektor, mengadaptasi nilai humanisme tersebut di USD?

Yang paling sistemik adalah sistem pembelajaran karena sebagian waktu mahasiswa di kampus ini digunakan untuk belajar. Dalam proses pembelajarannya, secara sistemik dilakukan ignatian pedagogi dan kita sudah melakukan secara sistemik selama lima tahun terakhir. Sekarang, ignatian pedagogi menjadi hal yang wajib diikuti di setiap pembelajaran.

Yang dimaksud dengan pedagogi ignatian itu pedagogi yang seperti apa?

Pedagogi yang orientasinya dari 3C, yaitu *competence*, *conscience*, dan *compassion*. Itu yang dipikirkan Driyarkara. 3C ini yang merumuskan adalah romo-romo serikat Yesuit. Jadi, indikator dari 3C adalah pendidikan yang mengantarkan mahasiswa yang kompetensial, mempunyai kepekaan hati nurani yang baik, dan sikap bela rasa atau yang lebih dikenal dengan *compassion* (empati) kepada sesama.

Bagaimana realisasi dari orientasi 3C tersebut diterapkan?

Untuk memfasilitasi hasil pendidikan seperti itu, cara

mendidik kita harus mengikuti dua siklus. Pertama, cara mendidik harus diawali dengan kejelasan mengonteks pembelajaran. Jadi, konteks itu menyangkut keadaan, jenis mata kuliah, dosen yang mengajar dan pengalaman belajar mahasiswa. Siklus kedua yaitu *experiences* (pengalaman). Di USD, dosen meminta mahasiswa mencari pengalaman hidupnya yang relevan dengan pembelajarannya. Tetapi jika tidak ada pengalaman, maka mahasiswa harus menciptakan pengalaman. Kemudian, pengalaman itu dievaluasi dan dilihat. Setelah evaluasi, selanjutnya dilakukan aksi. Aksi yang dilakukan juga ada evaluasinya. Evaluasi dari aksi tersebut bisa dalam bentuk tes atau presentasi.



Eka Priyatma saat diwawancarai awak **natas** di kantornya Jumat (27/5).

FOTO: JEJE

Apakah hal tersebut adalah salah satu indikator dari visi Anda sebagai rektor?

Rektor tidak punya visi. Yang punya visi dan misi itu yayasan, bukan saya. Saya hanyalah seorang rektor yang memimpin pelaksanaan kegiatan di kampus. Visi dan misinya ada di Rencana Strategis. Tujuan rektor adalah mengawal visi dan misi kampus yang tercantum di Rencana Strategis terlaksana.

Salah satu visi dari USD adalah menggali nilai kebenaran. Menurut Anda, bagaimana peran USD dalam menggali nilai kebenaran?

Jadi, menggali nilai kebenaran masuk ke dalam rumusan di situ, kan? Itu termasuk dalam rumusan karena kita memahami identitas kita sebagai penggali kebenaran. Lembaga ini bukan lembaga bisnis yang orientasinya menggali laba, ini adalah lembaga yang menggali kebenaran. Tentu saja, kebenarannya dalam konteks pokok kebenaran ilmiah, yaitu kebenaran yang proses mendapatkannya dan menggalinya itu dengan kegiatan ilmiah dan metodologi ilmiah. Jika penggalian kebenaran tersebut dilakukan, maka kebenaran tersebut akan sampai pada kebenaran yang hidup.

Bagaimana bentuk konkrit mengungkapkan nilai kebenaran tersebut direalisasikan?

Untuk kasus seperti kasus tahun 1965, lakukanlah kajian ilmiah, silahkan dipertanggungjawabkan secara

ilmiah. Kita tidak memiliki kepentingan politik apa pun, ini dalam rangka kampus, silahkan saja lakukan riset dan sebagainya. Silahkan maju, nanti kalau ada masalah, kami akan bela selama kita bermain di wilayah ilmiah. Ini sesuai dengan visi kita, menggali kebenaran. Kita tidak bermain politik, kita menghidupi panggilan kita sebagai ilmuwan yang mempunyai akademik yang kompeten sesuai dengan rumusannya, menggali kebenaran yang unggul, bukan yang *ecek-ecek*.

Mengenai Rencana Strategis (Renstra) USD, apakah penyusunan Renstra ini melibatkan mahasiswa?

Iya. Penyusunan Renstra tentu melibatkan mahasiswa. Wujudnya dalam bentuk diskusi tentang apa yang menjadi impiannya di kampus ini. Jangankan mahasiswa, alumni saja diundang. Alumni diundang karena alumni bisa merefleksikan dulu di USD merasa kurang apa.

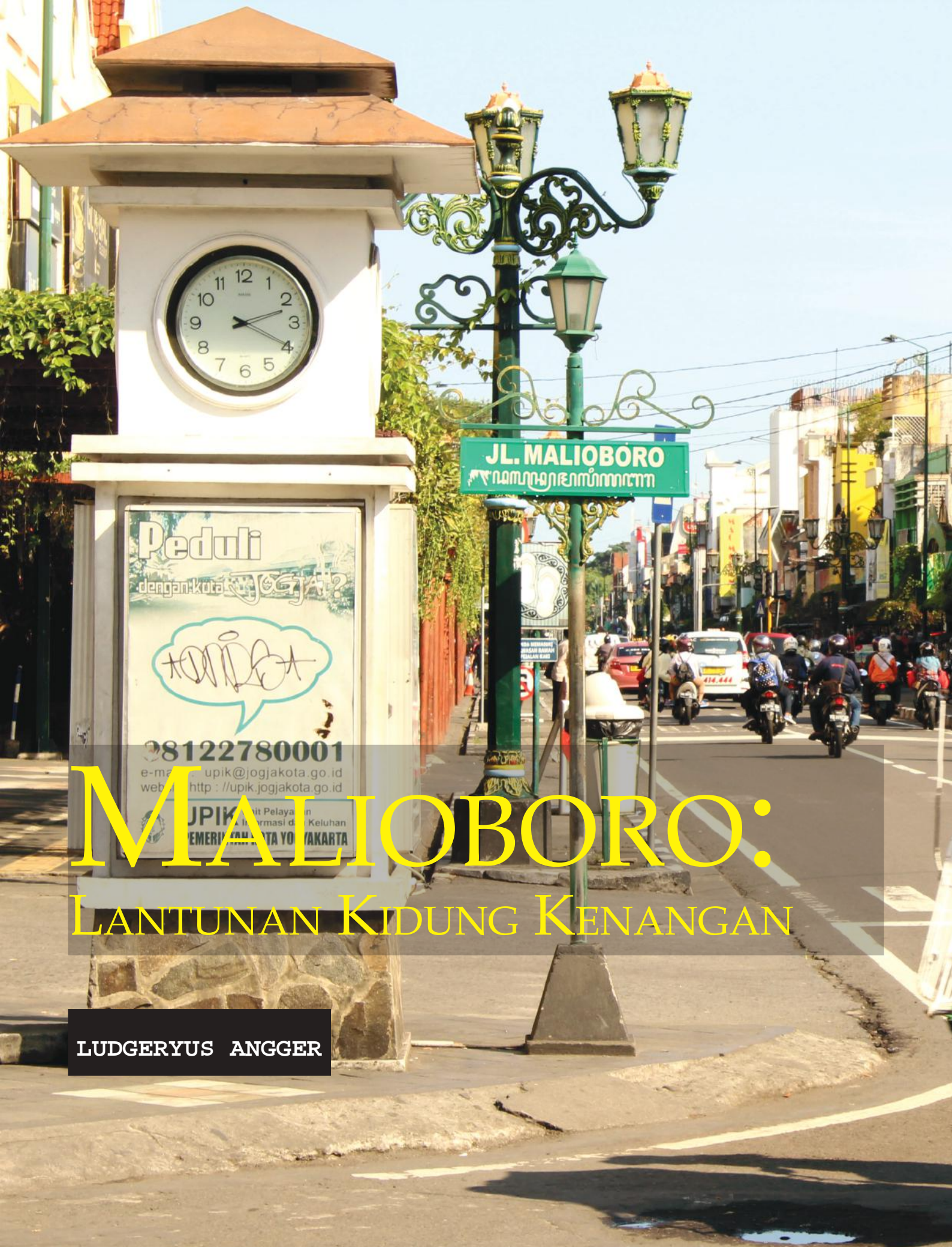
Apakah penyusunan renstra ini salah satu indikator keberhasilan USD mendapat akreditasi A?

Bukan. Setelah 3 tahun Renstra berjalan sejak 2013, kita evaluasi ketercapaiannya, mulai dari kualitas dosen dan karyawan serta prestasi mahasiswa. Indikator itu dilihat oleh pemerintah karena semuanya kita laporkan kepada pemerintah. Kalau kita tidak begitu, bagaimana bisa kita mendapat label PTS terbaik se-Jogja? Kita melaporkan data-data itu dan dinilai penampilannya baik sehingga kita tidak perlu

lagi menunggu akreditasi sampai tahun akreditasi berikutnya.

Apakah bisa langsung mengajukan akreditasi walaupun belum lima tahun?

Bisa, setahun saja kalau kamu mau dan yakin sudah bagus juga bisa. Kamu ingin mengajukan, kamu ingin dinilai, itu boleh. Itu yang membiayai pemerintah, itu tugasnya pemerintah. Tapi kita menangkap ini sebagai kesempatan untuk membangun motivasi supaya kita dikenal, inputnya semakin baik, dengan *input* yang baik, kesempatan kita untuk menghasilkan lulusan yang baik dan berkualitas akan tinggi. Itu berarti kontribusi kita juga akan tinggi ke masyarakat.



Peduli
dengan kota **YOGYAKARTA**?

KOMPAS

28122780001
e-mail: upik@jogjakota.go.id
web: <http://upik.jogjakota.go.id>

UPIK Unit Pelayanan
Informasi dan Keluhan
PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA

JL. MALIOBORO
ꦗꦭꦩꦭꦶꦲꦺꦴꦨꦺꦴꦫ

MALIOBORO: LANTUNAN KIDUNG KENANGAN

LUDGERYUS ANGER



Seorang pengayuh becak melintasi kawasan Malioboro Jumat (1/7).

FOTO: JEJE

Semburat jingga mulai muncul di ufuk barat, di kawasan Stasiun Lempuyangan, Kotabaru, Yogyakarta. Seorang pria paruh baya dengan berpakaian kemeja kotak-kotak, celana bahan berwarna coklat, dan sepatu hitam serta topi pet yang bertengger di atas kepalanya. Nampak wajah yang berkarya seni dan kata sedang duduk di atas kursi kayu tempat berjualan angkringan sambil bercengkrama ria bersama masyarakat dengan penuh tawa kebahagiaan. Suasana harmonis antarmasyarakat dibalut rasa kekeluargaan yang begitu mendalam menapaki waktu senja.

Pria kelahiran pasca kemerdekaan itu bernama lengkap Sutirman Eka Ardhana, merupakan seorang seniman serta sastrawan Malioboro yang pernah menjabat sebagai redaktur majalah *Sabana* dan 15 tahun terakhir ini juga mengajar di UIN Sunan Kalijaga, Fakultas Dakwah dan Komunikasi Penyiaran Islam. Beliau merupakan salah satu tokoh seniman dan sastrawan pada era 1970-1980 khususnya pada daerah Malioboro. “Dulu memang banyak seniman di Malioboro karena saat itu kebetulan pada tahun 1970 di Malioboro itu ada komunitas sastrawan muda yang namanya *Persada Studi Klub*, yang markasnya terletak di Jalan Malioboro yang sekarang menjadi perpustakaan nomor 175. Juga di sana dulunya ada kantor redaksi koran *Pelopor Jogja* namanya, Koran itu menyediakan halaman

untuk halaman anak muda dalam konteks tulis menulis sastra,” tukasnya sambil tersenyum.

Potret nostalgia kawasan Malioboro merupakan sarang atau markas untuk berkumpulnya para seniman dan sastrawan muda hingga tua. Mereka semua saling berbagi informasi, pengalaman, berdiskusi, dan berekspresi seni. “Dulu di Yogya, ada Akademi Seni Rupa Indonesia (ASRI) sekarang menjadi Institut Seni Indonesia (ISI). Mereka dulu sering kumpulnya di Malioboro karena suasananya mendukung. Ya tidak seperti sekarang ini,” ujarnya lagi sambil sedikit tertawa.

Selain kawasan Malioboro juga ada tempat yang sering dijadikan berkumpul yaitu gedung Senisono. Gedung Senisono merupakan tempat kesenian dan pameran hasil cipta karya para seniman, terkait dengan gedung Senisono dahulu gedung tersebut pernah hendak digusur oleh pemerintah. Namun karena desakan dari beberapa kalangan orang pengusuran itu terus mengalami penundaan. Menurut Sutirman dahulu juga banyak seniman yang menolak adanya pengusuran gedung Senisono, tetapi tidak sampai protes karena gedung itu adalah milik negara dan sebenarnya jika dalam sejarah areal tersebut merupakan areal gubernur Belanda, jadi gedung tersebut akan dikembalikan fungsinya seperti dulu. Lewat hasil konvensi bersama kemudian pemerintah membangun kembali sebagai penggantinya yaitu Taman budaya Yogyakarta yang

sekarang sering digunakan sebagai tempat pertunjukan atau pementasan teater, pantomim, dan kesenian lainnya.

Memang banyak seniman yang sering berkumpul di kawasan Malioboro seperti Emha Ainub Najib, Iman Budi Santosa, Anhar Gonggong, Andy Siregar, Daniel Dagidae, dan lain-lain. Sekumpulan seniman tersebut terkadang sering kali mengadakan acara-acara yang sifatnya tidak direncanakan berbeda dengan sekarang yang selalu direncanakan. Selain itu juga, sekumpulan anak muda dan aktivis mahasiswa yang tergabung dalam Gerakan Mahasiswa Sosialis (GeMSos) juga sering berkumpul di Malioboro. “Kalau dulu mereka sering berkumpul setiap hari minggu di Kantor Pelopor Yogya untuk berdiskusi, biasanya mereka diskusi tentang kebudayaan dan kesenian yang dilatarbelakangi dari kalangan mahasiswa,” tukasnya.

Keadaan Malioboro tempo dulu sangatlah berbeda jauh dengan kondisi sekarang. Kenyamanan untuk mencari inspirasi, berkarya, dan melakukan sesuatu jauh lebih mudah didapatkan pada masa lalu. Namun, tidak selamanya kenyamanan itu akan berjalan sesuai subyektif setiap orang masing-masing. Ini sama halnya dengan situasi dan kondisi Malioboro yang pernah mengalami fase kekelaman. Pada tahun 1970 undang-undang tentang Narkotika belum diberlakukan. Semua orang khususnya kalangan anak muda masih bebas menggunakan dan

mengonsumsi obat-obatan terlarang seperti ganja, narkoba, dan lain sebagainya. “Kalau sudah lewat malam sekitar jam 10 malam di Malioboro tempat anak-anak muda *“nge-fly”* karena pengaruh ganja dan obat-obatan, tetapi sejak diberlakukannya peraturan tentang penggunaan Narkotika pada tahun 1976 sudah tidak ada lagi orang yang menggunakan obat-obat terlarang tersebut di kawasan Malioboro.” lontar Sutarman. Seiring berjalannya waktu, di era 1980 menjadi cikal bakal transisi atau perubahan total dari kondisi sekitar Malioboro. “Perkembangan arus zamanlah yang membuat adanya perubahan pada keadaan lingkungan sekitar di kawasan Malioboro,” lanjutnya lagi.

Dengan keadaan yang telah mengalami masa perubahan dalam waktu dan ruang, menurut Sutirman keadaan seperti ini memberikan dampak positif bagi kalangan seniman karena, di sisi lain mereka harus menemukannya ruang yang lebih luas lagi. Jadi ketika para seniman berekspresi mereka tidak hanya terpaku pada suasana Malioboro yang sepi dan nyaman, tetapi juga memotivasi bahwa sebagai seniman harus dapat berkarya dalam situasi apapun. Ini menjadi tantangan khususnya bagi para penerus yaitu seniman muda agar mampu dan dapat menghasilkan karya ataupun berkespresi di tengah suasana yang telah mengalami perubahan serta perkembangan zaman seperti sekarang.

Mengakhiri ceritanya beliau berpesan agar, kita sebagai manusia yang memiliki akal dan



Tempat yang dahulu kerap digunakan seniman Yogya untuk berkumpul Jumat (1/7).

FOTO: JEJE

budi serta hati nuraninya. Arus globalisasi bukanlah musuh bagi kita untuk selalu menyalahkan, menyalahgunakan menutup diri, dan bertolak pada masa lalu. Ini semua tergantung dengan diri kita sendiri, ketika berproses menghadapi arus perubahan

dan perkembangan zaman harus dapat memposisikan diri kita selaras dengan nilai etika, ajaran dan norma yang terdapat dalam kehidupan masyarakat sekitar.

JENAZAH

ANDREAS RAHARDJO*

Kata orang, itu bukan jenazah. Itu hanya seongkok daging cincang yang terjatuh dari mobil pengangkut daging sapi, terlindas sedan, truk, tronton, dan puluhan makhluk beroda lainnya. Daging itu pun semakin tak berbentuk, terdukung kodratnya sebagai seongkok daging cincang. Dan bukankah daging cincang memang tak berbentuk?

Tapi Mariyam berkata tidak. Ada yang berbeda dari seongkok daging itu. Ada nyawa yang baru saja lepas darinya. Nyawa yang terjalin dalam hubungan batin dengannya. Nyawa yang lahir dari rahimnya.

Mariyam menangis. Melolong dan meringis. Meratapi seongkok daging berdarah di tepi jalan. Orang-orang berlalu-lalang, pergi kesana-kemari.

Mariyam tetap sendiri.

“Pisau.”

“Baik, dok.”

“Gunting.”

“Ini, dok.”

“Tang.”

“He?”

Asisten residen terdiam.

Tang?

“Tidak ada tang, dok.”

“Ya cari.”

“Tapi..”

“Cari!”

Asisten residen bergegas dari ruang otopsi, pergi menuju bilik *out sourcing* dan bertanya, “Ada tang?” Spontan sejumlah petugas kaget melihatnya.

“Maaf dok, tidak ada tang di sini.”

Asisten residen kembali bergegas. Melaju ke lift, turun dua lantai menuju *basement*. Menemui petugas satpam, tukang parkir, bahkan *cleaning service*. Nihil. Tak ada tang di sana. Dia pun pergi, kembali ke ruang otopsi. Kuyu wajahnya mengerut melihat sang dokter menusuknya dengan tatapan tajam menghakimi.

“Mana tangnya?”



Jean Hippolyte Flandrin's *Pietà*

“Tidak ada, dok. Tidak ketemu.”

“Ke mana saja kamu?”

“Keliling rumah sakit, dok. Nihil.”

Si dokter terdiam. Si asisten pun membisu. Si dokter masih sibuk menusuknya dengan tikam-tikam tatapan yang dingin. Lalu perlahan si dokter mengalihkan pandangannya pada gumpalan daging berdarah itu. Matanya menghangat. Dia menghela nafas panjang.

“Aneh.”

“Kenapa, dok?”

“Ada paku di sana.”

“Di mana?”

“Di mana lagi? Ya di daging itu.”

Residen terdiam. Ditatapnya gumpalan daging itu, daging yang datang sore tadi menjelang maghrib. Seorang perempuan paruh baya datang membawanya dengan tangan bersimbah darah, tertatih-tatih seorang diri menuju UGD. “Tolong! Tolong

anak saya!” ujarinya. Seorang perawat datang menghampirinya, bertanya apa yang bisa dia bantu. Perempuan itu memintanya untuk merawat gumpalan daging yang dibawanya sore itu sembari berkata, “Tolong, suster. Dia anakku.”

“Tapi itu daging, bu. Daging cincang.”

“Dia anakku! Rawatlah dia. Dia butuh pertolonganmu. Tolong...”

Melihat keseriusan ibu itu, sang perawat menarik brankar besi di dekatnya, membungkus kedua tangannya dengan pelapis steril, lalu mengambil gumpalan daging itu dan membawanya di atas brankar. Dia sebenarnya tidak yakin akan apa yang sedang dilakukannya. Merawat daging cincang? Yang benar saja? Namun entah mengapa sorot mata perempuan itu menyentuhnya. Menggerakkan hatinya untuk segera mengambil alih segumpal daging cincang seberat tujuh kilogram dari peluk sang ibu.

“Sebentar ya, bu. Kami bawa anak ibu ke ruang otopsi.”

“Otopsi?”

“Tenang, bu. Kami tidak akan melakukan hal yang aneh-aneh. Hanya membersihkannya, lalu *mendandaninya*. Seperti sedia kala.”

Perempuan itu membisu. Melangkah sayu ke bangku pasien ditemani seorang perawat lain yang diberi pesan, “Temani dia. Sebentar lagi petugas RSJ datang menjemputnya.” Perawat wanita itu mendorong brankar dengan perlahan, mengamati gumpalan daging cincang nan basah berlumur darah di atas brankar. Aneh, batinnya. Sepertinya daging itu berdenyut. Ah, masa bodoh. Bawa ke ruang otopsi, serahkan residen, selesai.

Daging itu pun tiba di ruang otopsi. Residen jaga datang menghampiri perawat itu.

“Ini, terserah mau diapakan.”

“Ini apa?”

“Daging.”

“Ya, saya juga tahu ini daging. Daging apa?”

“Entahlah. Tugasmu mencari tahu.”

Maka begitulah. Singkat kata, daging itu mendekam di pendingin jenazah, menanti selama berjam-jam antrian (cukup banyak jenazah yang harus diotopsi sore itu; korban pembunuhan, mutilasi, kecelakaan, dsb. Musim jenazah, rupanya), sampai tak ada lagi jenazah yang mengantri otopsi kecuali segumpal daging seberat tujuh kilogram itu. Awalnya si dokter pun enggan menjamahnya, lelah mengotopsi sepuluh jenazah dalam satu malam. Namun ada yang lain dari daging itu, suatu hal yang menariknya untuk menarik daging itu dari lemari pendingin, menghangatkannya, membasuhnya, lalu memeriksanya, inci demi inci. Entah apa yang menariknya, seolah daging itu berbisik padanya, “*Jamah aku. Jamahlah.*”

“Ada tiga paku di sana. Menancap kuat, tepat di dalam.”

“Di dalam? Bagaimana bisa?”

“Entahlah. Mungkin dia mati tertusuk paku.”

“Jadi ini positif...”

“Positif apa?”

“...daging, manusia?”

“Mungkin.”

“Bagaimana dokter tahu?”

“Firasatku berkata demikian. Puluhan tahun aku menjamah daging-daging manusia tak bernyawa. Daging kita berbeda dengan daging sapi potong. Kau akan bisa merasakannya kelak setelah puluhan tahun menjadi seorang petugas otopsi.”

“Apa bedanya, dok? Toh semua daging-daging itu

berwarna merah kehitaman.”

“Sembarangan! Tentu saja tidak. Ada yang khas dari daging kita, bahkan setelah kita mati.”

Residen itu terdiam. Hening semakin panjang membungkus malam, dan dia semakin bingung dengan apa yang dokter itu katakan. Si dokter, sementara itu, masih menatap gumpalan daging itu dengan mata menerawang jauh ke depan.

“Ada roh yang lepas darinya. Itu bedanya.”

Jadi, si dokter dan asistennya asyik menghabiskan waktu bersama sekerat daging cincang tak berbentuk selama berjam-jam, hanya untuk berbincang soal daging, manusia, dan roh. Residen itu memang tertarik dengan ilmu otopsi, namun malam itu dia lebih tertarik dengan dongeng si dokter tentang asal-usul roh dan daging manusia. Sembari membersihkan daging itu dengan perlahan, si dokter menceritakan padanya kisah turun-temurun yang diperolehnya dari nenek-moyangnya.

“Kamu tahu kisah Adam dan Hawa?”

“Tahu.”

“Nah, mereka berdua awalnya sama dengan makhluk-mahluk yang lain. Dibentuk dari tanah dan debu. Yah, diberi air sedikitlah, supaya liat dan mudah dibentuk. Rupanya Tuhan suka bermain lempung.

“Suatu ketika, Tuhan bosan dengan ciptaan-Nya. Tak satu pun ciptaan itu bisa diajak ngobrol. Mereka bodoh, hanya



Chaim Soutine's Le Boeuf

asisten, sementara itu, hanya mengamatinya mengutak-atik daging itu dari berbagai sisi. Dia mengernyit.

“Bagaimana kamu tahu?”

“Tahu apa?”

“Kalau nafas Tuhan baru saja lepas darinya?”

Si dokter menghentikan pekerjaannya. Keasyikannya terputus. Dia meletakkan peralatannya, membasuh tangannya, menarik dua kursi, duduk, lalu berkata, “Duduklah. Mari berbincang.”

“Tidakkah kamu mengerti? Aku sudah memberitahumu tadi. Daging kita berbeda dengan daging sapi potong. Kamu akan mengerti...”

“...kelak setelah puluhan tahun menjadi seorang petugas otopsi. Ya, aku tahu. Tapi bagaimana kamu tahu? Bagaimana kamu bisa tahu kalau ada sesosok roh yang baru saja lepas dari segumpal daging itu? Apakah roh itu seperti jin, halus, tembus pandang, dan menguap dari daging itu layaknya asap? Apa yang kamu lakukan hingga kamu bisa mengetahuinya?”

“Nak, kamu masih muda. Masih terlalu dini bagimu untuk mengetahui semua itu.”

“Apa salahnya? Apa semua itu berhubungan dengan ilmu hitam? Guna-guna? Mata batin?”

“Dengar Nak. Daging itu...”

Si dokter menghela nafas panjang. Matanya menghangat. Residen itu masih muda, seusia anaknya. Anaknya yang mati terlindas truk, ngeyel diberitahu untuk tidak seenaknya memacu deru kuda besinya. Dia sendiri yang mengotopsi mayat anaknya. Wajahnya menyerpih, tak tersisa.

bisa makan, tidur, kawin dan beranak. Hingga suatu ketika muncullah di benak-Nya sebuah gagasan: bagaimana kalau Aku menciptakan saja citra diri-Ku? Maka Tuhan pun mengambil segumpal lempung, bercermin, lalu membentuknya persis seperti diri-Nya sendiri. Nah, ini yang penting: Dia menghembuskan nafas-Nya pada replika diri-Nya

itu. Nafas itulah yang membuat segumpal lempung itu hidup, namun tak hanya hidup. Dia hidup dengan akal dan hati. Itulah roh, nafas Tuhan yang mengalir dalam nadi manusia.”

“Jadi, maksudmu nafas Tuhan baru saja lepas dari daging itu?”

“Ya, kurasa begitu.”

Si dokter masih berasyik-masyuk dengan daging itu. Sang

Kamu seperti anakku, batinnya. Susah dikasih-tahu.

“Daging itu berdenyut.”

“Apa?”

“Berdenyut.”

“Jangan bercanda.”

“Kamu hanya melihatnya, namun tidak merasakannya. Rasakan, tajamkan matamu. Lihat sendiri kalau tidak percaya.”

Residen itu berdiri.

Menghampiri gumpalan daging yang kini sudah bersih, jauh lebih bersih. Mengamatinya inci demi inci. Aneh memang. Tiga paku menancap tepat di tiga sisi, membentuk tiga sudut segitiga. Dan tepat di tengahnya, ada sesuatu yang membuatnya terhenyak. Daging itu berdenyut, tepat di tengah. Begitu pelan.

“Ini bohong, kan?”

“Kamu boleh tidak percaya, tapi itu kenyataannya.”

“Tapi ini daging orang mati!”

“Daging orang mati tidak sepenuhnya mati. Kita benar-benar mati ketika otak kita berhenti bekerja. Jaringan-jaringan yang ada masih bekerja, begitu pelan, hingga darah kita mengental dan menggumpal. Daging ini, anehnya, tidak demikian. Tak ada gumpalan darah di sana. Darahnya encer layaknya manusia yang masih hidup. Mengalir dari tiga tempat di mana paku-paku itu tertancap.”

Residen itu terhenyak. Dia merinding. *Tidak mungkin. Ini tidak mungkin.*

“Jadi benar, nafas Tuhan baru saja lepas darinya?”

“Sebenarnya tidak. Aku mulai ragu sekarang. Harusnya denyut itu sudah hilang berjam-

jam yang lalu, beberapa waktu setelah seseorang meninggal. Tapi daging itu tetap berdenyut. Sepertinya daging itu hidup.”

Residen membisu.

Melangkah perlahan ke kursi dengan setumpuk pertanyaan di benaknya. Daging. Roh. Nafas Tuhan. Manusia. Adam dan Hawa. Dia masih belum mengerti, bahkan mungkin sudah tidak berminat untuk mengerti. Membiarkan dirinya dipenuhi oleh berbagai pertanyaan yang tak terjawab dalam benaknya.

“Sudahlah, Nak. Tidak usah dipikirkan. Aku sudah berkata padamu, kamu masih terlalu muda. Cukuplah kita mengotopsi daging ini. Kita taruh dia di ruang jenazah.”

“Buat apa kita menaruh segumpal daging cincang di ruang jenazah? Nanti kita disangka orang bodoh, dok.”

“Daging ini datang dari seorang perempuan yang mengaku dirinya sang ibu dari daging ini. Sudah jadi etika kita untuk menghormati keluarga pasien.”

Si dokter menghentikan percakapannya. Dia membersihkan darah yang mengalir darinya, menaruhnya di sebuah kotak steril, lalu membawanya ke ruang jenazah. Si residen menemaninya dalam diam.

Malam telah berganti pagi.

Waktu berlalu. Tiga hari sudah daging itu mendekam di ruang jenazah. Perempuan yang dulu datang bersamanya memaksa untuk datang menjenguknya.

“Aku Mariyem, dan aku ibunya!” desaknya. Merasa iba, petugas RSJ pun mengizinkannya. Dia pergi ke rumah sakit itu bersama tiga orang penjaga yang diberi pesan, “Antar dia subuh-subuh, biar tidak mengganggu pasien yang lain.”

Fajar menyingsing. Ruang jenazah begitu sepi. Jenazah-jenazah lain telah dibawa oleh keluarganya masing-masing di hari yang lalu. Mariyem bergegas, menarik langkahnya menuju ruang di mana anaknya berada.

“Di mana dia? Di mana?”

“Di sana, bu. Dalam kotak di sudut ruangan.”

Mariyem berlari. Para petugas pergi mengiringi. Sesampainya mereka di ruangan itu, mereka dikejutkan oleh sebuah pemandangan.

Kotak itu kosong. Daging itu tak ada di sana. Jejak darah membekas di lantai, jejak setapak yang terbentuk tepat di muka kotak, begitu lurus, sampai berhenti di muka tembok tepat di hadapannya. Di sana tergantung sebuah kayu salib.

Darah menetes darinya.

“Inilah tubuh-Ku yang diserahkan bagi kamu.”
(Luk. 22:19)

Sleman, 7 Januari 2013

*Penulis adalah mahasiswa Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris 2012

SAJAK YANG TERTINDAS

Di antara benci, aku berjalan.
Cacian adalah pelukku.
Gunjingan adalah antingku.
Hingga aku tahu bahwa pengkhianatan
datang pelan merayap
membunuh hakikat.
Lalu aku bertanya, untuk apa aku hidup?

Gunjingan, makian, kebencian, kemunafikan serentak menjawab,
"engkau hidup untuk melawan kami, mencari hakikat di tengah lumpur hingar-bingar pesta,"

Tanyaku tetap berucap, mengapa aku hanya sendiri berperang?

Sahabat dan temanku kini menyahut,
"kami tak butuh kamu karna hakikat tak lebih indah dari pesta. Pergilah menuju perasinganmu
karna kamu hanya idealis, anjing atheis, kafir, musrik!!!"

Lalu kulihat hakikat terbujur lemah di atas onggokan bekonang, merintah di bawah perayaan.
Ia melenguh nanar, merapal pesan kepada malaikat di kepala manusia.
"Sadarilah bahwa aku tak pernah nampak, bahwa aku hadir di balik kisah, menjadi roh dari peristiwa."

Aku tak berdaya seperti halnya hakikat.
Aku terbunuh oleh pesta dan perayaan.
Aku tertikam senyum rayu sahabat.
Aku terasing dari hingar dentum tawa.

Dan aku hanya petarung compang-camping
membelai hakikat yang sekarat.

J.B. Judha Jiwangga
Mertoyudan, 30 Mei 2012



Ilustrasi: Achmad FH Fajar

DOA SEORANG GURU

Otak bergulir dalam sudut kelas.
Pengetahuan berkumpul dalam buku
namun, semua hanya lalu
lalu
lalu
berlalu.
Tak ada kepala yang disinggahi.
Tak ada makna yang mampu dikecup.
Tak ada perubahan yang mampu terwujud.

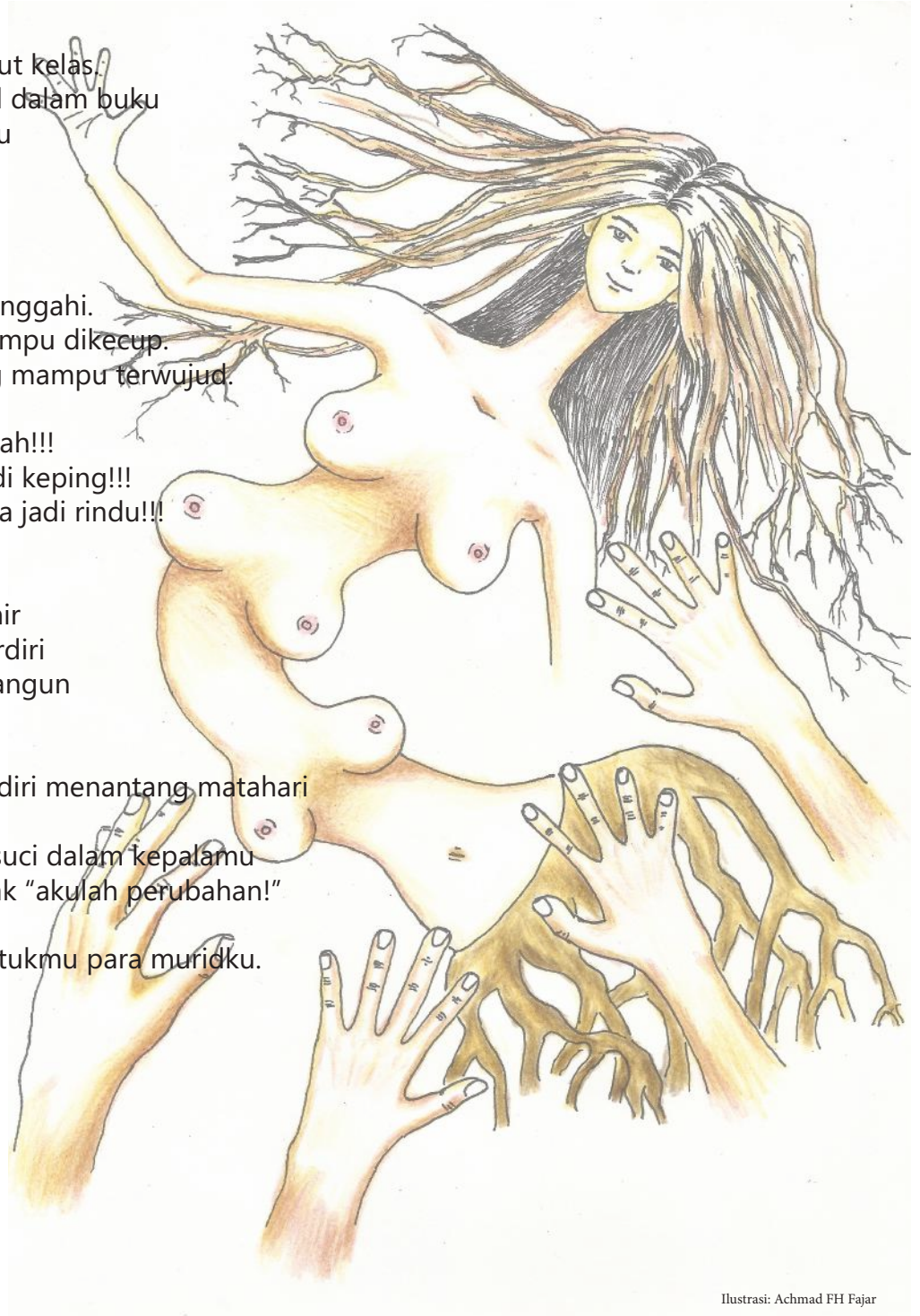
Maka dari itu, pecahkanlah!!!
Hancurkanlah hingga jadi keping!!!
Benturkanlah hingga luka jadi rindu!!!

Dari situ,
ada harap yang ingin lahir
ada tunas yang ingin berdiri
ada mimpi yang ingin bangun

Kelak,
aku akan melihatmu berdiri menantang matahari
dan bulan,
menerjang batas-batas suci dalam kepalamu
hingga, kau bisa berteriak "akulah perubahan!"

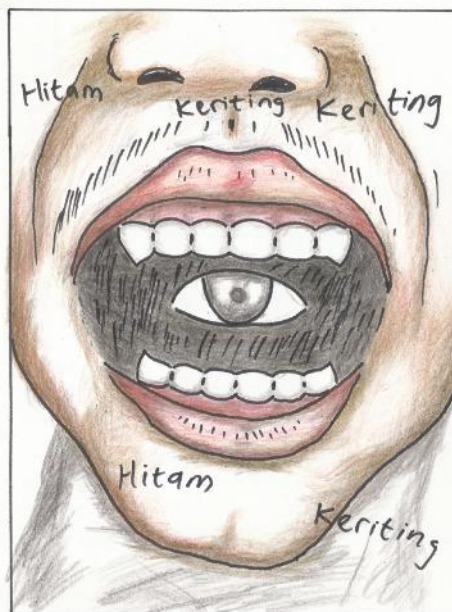
Itulah rapalan doaku, untukmu para muridku.

J.B. Judha Jiwangga
Mrican, 23 Juli 2016



Ilustrasi: Achmad FH Fajar

SI ICHIR IKUT KARNAVAL





UNIVERSITAS

SANATA

DHARMA

Pindai QR Code
di samping untuk
mendapatkan majalah
versi digital

